

**SKRIPSI**

**URGENSI PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PESANTREN DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**MITA PERMATA SARI  
NIM 17.2600.023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

**SKRIPSI**

**URGENSI PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PESANTREN DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**MITA PERMATA SARI  
NIM 17.2600.023**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Urgensi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pesantren Di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Mita Permata Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.023  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1172 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001  
Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H.  
NIP : 19700917 199803 1 002

(.....)

(.....)

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Urgensi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pesantren Di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Mita Permata Sari  
NIM : 17.2600.023  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1172 Tahun 2023  
Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Ketua) (.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Sekertaris) (.....)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Anggota) (.....)

Hasanuddin Hasim, M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Darliah dan Ayahanda Aiptu Sakri tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Terimakasih penulis ucapkan kepada Kepala Perpustakaan IAIN parepare dan seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya untuk orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun material serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudari saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi, juga selalu memberikan bantuan moril maupun materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih juga, yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan motivasi dan semangat, Kepada teman-teman seperjuangan selama Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), terimakasih atas kebersamaannya selama kurang lebih 45 hari meskipun singkat namun sangat berkesan dan semoga kita bisa bertemu lagi.
9. Terimakasih juga kepada pihak Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Pihak Kantor Statistik Kota Parepare dan Pihak Pondok Pesantren Al Mustaqim, Pondok Pesantren Hidayatullah dan Pondok Pesantren Ujung Lare atas kerjasamanya telah menerima dan membantu penulis selama melakukan penelitian.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material. Juga kepada semua pihak yang telah terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada kalian semua, karena dukungan dan bantuan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Juli 2024  
11 Muharram 1446 H

Penulis,



Mita Permata Sari  
Nim: 17.2600.023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mita Permata Sari  
NIM : 17.2600.023  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare / 04 Agustus 1999  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Urgensi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pesantren  
Di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Juli 2024

Penulis,



Mita Permata Sari

Nim:17.2600.023

## ABSTRAK

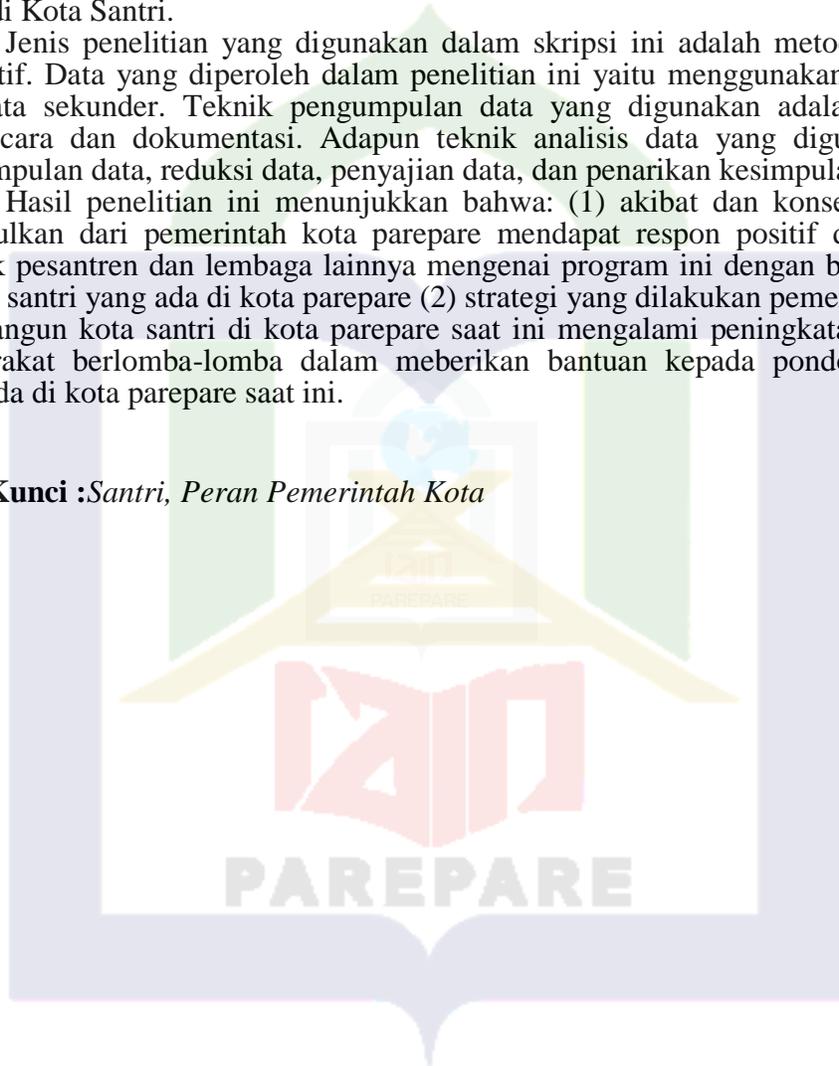
Mita Permata Sari, *Peran Pemerintah Dalam Membangun Kota Parepare sebagai Kota Santri*, (dibimbing oleh Rahmawati dan Badruzzaman).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Membangun Kota Parepare sebagai Kota Santri. Hal-hal yang menjadi permasalahan yaitu apa peran pemerintah yang ditimbulkan dari pembangunan Kota Parepare ini menjadi Kota Santri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dari pemerintah kota parepare mendapat respon positif dari berbagai pondok pesantren dan lembaga lainnya mengenai program ini dengan bertambahnya jumlah santri yang ada di kota parepare (2) strategi yang dilakukan pemerintah dalam membangun kota santri di kota parepare saat ini mengalami peningkatan sehingga masyarakat berlomba-lomba dalam memberikan bantuan kepada pondok pesantren yang ada di kota parepare saat ini.

**Kata Kunci :** *Santri, Peran Pemerintah Kota*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teoritis .....	10
1. Teori Urgensi Pemerintah .....	10
2. Teori Kota Madani .....	12
3. Teori Kota Religius .....	17
4. Teori Kebijakan Publik .....	21
5. Teori Tata Kelola (Governance) .....	23
6. Teori Pembangunan .....	24
7. Teori Sosiologi Politik Islam .....	25
8. Teori Antropologi Politik .....	29

C. Tinjauan Konseptual .....	34
D. Bagan Kerangka Pikir .....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Kebijakan Pemerintah Dalam Membangun Kota Parepare Sebagai Kota Santri.....	43
2. Program Pembangunan Yang Dirancang Pemerintah Sebelum Dan Sesudah Dalam Membangun Kota Parepare Sebagai Kota Santri .....	46
3. Strategi Pembangunan yang Dilakukan Pemerintah dalam Membangun Kota Parepare Sebagai Kota Santri .....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
1. Profil Pesantren Kota Parepare .....	58
2. Pengembangan Lingkungan Santri Yang Kondusif .....	64
3. Peningkatan Akses Pemerintah Dalam Membangun Kota Santri .....	65
4. Peningkatan Sinergi Dan Peran Aktisifasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Kota Santri .....	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN .....	
BIOGRAFI PENULIS .....	

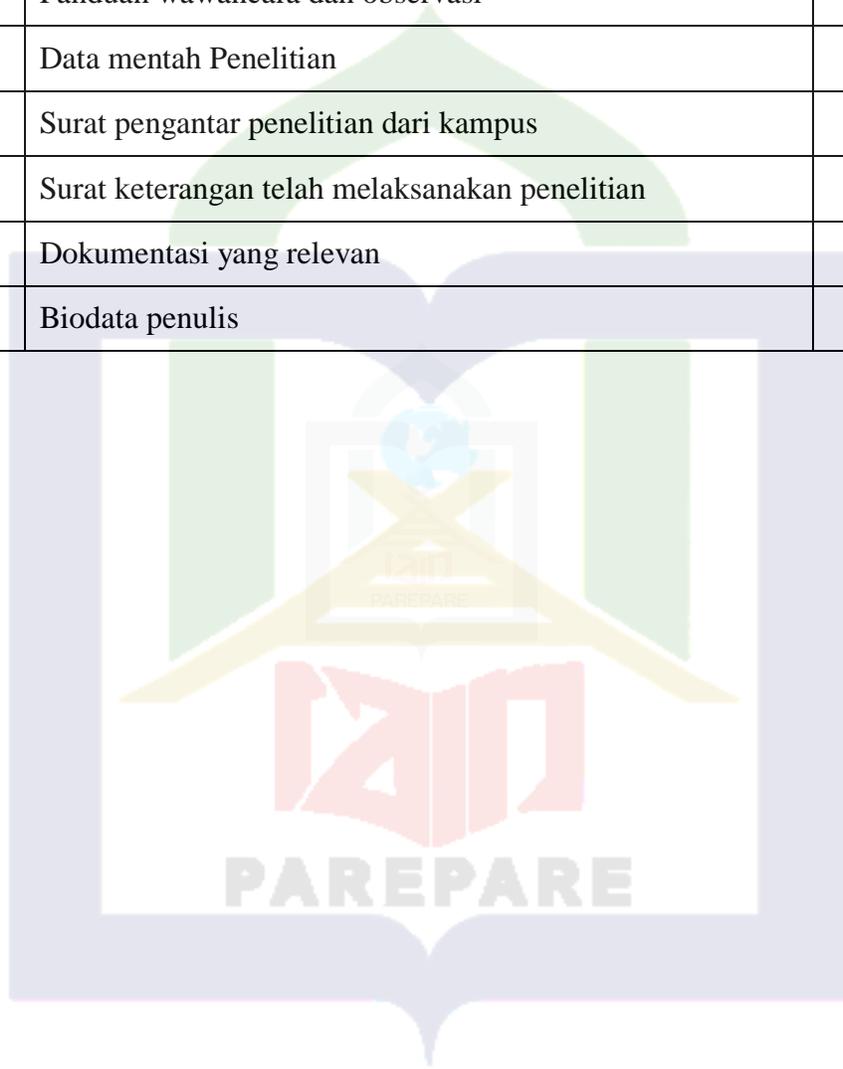
## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	23



## DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Panduan wawancara dan observasi	I
2	Data mentah Penelitian	III
3	Surat pengantar penelitian dari kampus	XI
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	XII
5	Dokumentasi yang relevan	XIII
6	Biodata penulis	I



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Tabel 1.1

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

## b. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tabel 1.2

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tabel 1.3

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

- c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 1.4

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
اُ	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta  
 رمى : ramā  
 قيل : qīla  
 يموت : yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *Dīnullah*                      بِاِلهِ                      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *Hum fī rahmatillāh*

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang

(*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah yang berkalasepertijurnal, majalah, buku dan lain-lain sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Islam di Indonesia sangatlah berpengaruh bagi seluruh masyarakat, dikarenakan saat ini, islam merupakan agama yang banyak dinanut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Penyebaran islam di Indonesia sendiri dianggap berasal dari beberapa sumber, seperti kegiatan perdagangan oleh penguasa lokal, serta adanya pengaruh tasawuf.

Islam pada awalnya diperkenalkan melalui pedagang muslim arab. Setelah itu, lewat aktivitas dakwah yang dilakukan para ulama. Seiring berjalannya waktu, politik islam juga mulai bertumbuh. Secara umum, para pedagang lokal dan orang-orang kerajaan besar adalah orang-orang pertama yang mengadopsi agama baru. Penyebaran islam pun kian terasa setelah seorang pedagang muslim menikahi wanita Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan, Indonesia menjadi negara Muslim terbesar kedua di dunia. Perkembangan muslim di Indonesia yang selanjutnya telah membawa negara ini semakin dekat dengan pusat intelektual islam. Selain itu, salah satu tokoh ternama yang juga menggeluti bidang islam adalah Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur yang kemudian menjadi presiden Indonesia.<sup>1</sup>

Sejak masuknya islam di Indonesia dan mulai menyebar keseluruh Nusantara, para pedgang yang merangkap sebagai mubaligh dan pendidik telah memperkenalkan

---

<sup>1</sup><https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/21/120000879/sejarah-masuk-dan-berkembangnya-islam-di-indonesia>,

ajaran islam kepada masyarakat pribumi. Pendidikan awal itu belum memiliki sarana dan fasilitas, belum ada jadwal dan materi tertentu, lebih banyak bentuk pergaulan antara mubaligh/pendidik dan masyarakat sekitar. Setelah masyarakat muslim terbentuk, mulailah dibangun masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, tumbuhlah lembaga pendidikan awal yakni masjid. Di masjid dilaksanakan aktivitas ibadah sholat dan juga pendidikan islam, memperkenalkan akidah dan ibadah serta belajar membaca Al-Qur'an.

Oleh karena itu semakin banyaknya peserta didik, sesuai arus dinamika perkembangan islam, mulailah dibutuhkan lembaga pendidikan di luar masjid. Maka, tumbuhlah lembaga pendidikan pesantren, menasah, rangkang, dayah dan surau. Lembaga pendidikan ini berkembang karenadukungan masyarakat dan kerajaan islam kala itu.

Masuknya ide-ide pembaruan pemikiran ke indonesia pada awal abad-20 yang di bawah oleh para pelajar islam indonesia, maka mulailah era baru dalam pendidikan islam, yakni timbulnya dinamika dan perubahan pada lembaga pendidikan islam. Pada masa itu muncullah madrasah sebagai institusi yang memadukan antara sistem pesantren dan sekolah, serta sistem pembelajarannya pun telah berubah dari sistem tradisional menuju sistem modern. Lembaga pendidikan pesantren pun mengalami dinamika pula dengan munculnya beberapa pesantren modern.

Setelah kemerdekaan indonesia, tumbuhlah berbagai lembaga pendidikan islam yang disemangati oleh spirit pembaruan. Pesantren telah mengalami dinamika sehingga sehingga tumbuhlah pola pesantren yang berakar pada pola pesantren salafi yang kuat berpegang pada tradisi awal mengkaji dan mendalami kitab-kitab klasik. Adapun pola pesantren modern telah mengkombinasikan pengetahuan agama dan

umum (sains) dalam kurikulumnya serta sistem pembelajarannya telah mengikuti sistem pembelajaran modern.

Lembaga pendidikan yang telah tumbuh sejak zaman kolonial Belanda, setelah kemerdekaan Indonesia dimasukkan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran yang wajib di ajarrkan disekolah. Pada mulanya pendidikan agama islam bersifat optional (pilihan), kemudian berkembang menjadi pelajaran wajib dan menjadi hak peserta didik.<sup>2</sup>

Masuknya pendidikan islam di seluruh Nusantara khususnya di provinsi Sulawesi Selatan tentunya sangat berpengaruh bagi masyarakat, hal ini dikarenakan selain mayoritas penduduknya beragama islam, juga karena masyarakatnya yang mempunyai karakteristik rasa keagamaan yang kuat dalam berbagai aktivitas hidup kesehariannya. Diakuinya bahwa masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat religius, tentu tidak terlepas dari kedatangan/peranan para mubaligh yang membangun agama islam pertama di daerah Sulawesi Selatan.<sup>3</sup>

Pendidikan bukan sekedar menggumuli fenomena yang tampak dari luar saja, tetapi juga langsung mengenali dan memahami konsepsi dasarnya, kemudian menganalisisnya secara nalar. Demikian halnya dalam pendidikan tinggi hukum, bahwa keberadaannya juga mentransfer teori, atau ilmu hukum sebagai proses sosialisasi untuk mengenal dan memantapkan nilai-nilai baru dalam bidang hukum dalam rangka memajukan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup><https://prenadamedia.com/product/pendidikan-islam-di-indonesia-historis-dan-eksistensinya>,

<sup>3</sup>Drs.H. Bahaking Rama, M.S., *Metode Penyebaran Islam Pada Awal Berkembangnya di Sulawesi Selatan dan Relevansinya Dengan Dakwah Islam di Kota Madya Ujungpandang* (Ujungpandang : Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujungpandang, 1996), h.1

<sup>4</sup> Badruzzaman, S.Ag., M.H *Pengantar Ilmu Hukum* (2019). h.17.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh di Kota Parepare, karena merupakan salah satu kota yang terdiri dari masyarakat yang multikultural, berasal dari berbagai macam suku bangsa, etnis dan agama. Keberagaman masyarakat merupakan salah satu unsur pembangunan kota Parepare dari masa ke masa untuk pendidikan islam yang baik bagi masyarakat Kota Parepare, yang mana pada saat ini telah menjadi Kota santri.

Pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan Forum Mushabaqah Tilawatil Qur'an Kota Parepare serta kantor Kementerian Agama Kota Parepare mengadakan acara pembukaan Mushabaqah Tilawah Qur'an tingkat Kota Parepare.

H.M. Taufan pawe selaku bapak walikota Kota Parepare menjelaskan bahwa pelaksanaan ini tidak terlepas dari semangat pemerintah kota untuk membangun kota ini dengan arah yang jelas yaitu meningkatkan pembangunan keummatan dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota Santri dan kota ulama. Beliau juga menyampaikan untuk sama-sama menjadi ahli syukur atas kemajuan pembangunan, baik pembangunan keummatan maupun pembangunan infrastruktur. Melalui ini semoga kita semua bisa menjaga nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

Dan dari data hasil observasi awal yang penulis kumpulkan bahwa ada 9 Pondok Pesantren yang ada di Kota Parepare diantaranya: Pondok Pesantren Al Munawwarah, PonPes Salafiyah Al-Jawahir, Pesantren Ddi Lil Banat, PP Hafidziyah, Pesantren Ummul Quro, PonPes Al-Badar, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, PP Hidayatullah, dan Pondok Al-Mustaqim. Dalam PERDA NO. 6 Tahun 2023 pasal 7 tentang "Fasilitas Penyelenggara Pesantren" ialah, Pemerintah Daerah dapat

---

<sup>5</sup><https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/taufan-pawe-jadikan-kota-parepare-sebagai-kota-santri-dan-kota-ulama-ZltVN>

memberikan fasilitasi kepada Pesantren dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemberian fasilitasi Penyelenggaraan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: hibah dan/atau bantuan sosial. Dan anggaran yang diberikan oleh bapak Walikota Parepare kepada salah satu pesantren di Kota Parepare adalah kisaran Rp50.000.000,- .

Seperti yang disampaikan bapak Walikota Parepare pada kegiatan Musabaqah Tilawah Qur'an (MTQ) bahwa, "Saya terharu sekali, Gurutta Kiai Haji Iskandar Ali selaku pendiri dan motivator berdirinya yayasan ini, telah menyumbangkan dananya. Maka dengan keikhlasan saya beserta keluarga, juga ikut mewakafkan dana saya. Saya serahkan kepanitia pembangunan, sebesar 50 juta rupiah.<sup>6</sup>

Urgensi peran pemerintah dalam penyelenggraan pesantren sangatlah penting bagi masyarakat Kota Parepare, sebagai tempat pembelajaran islam dan penyebaran agama islam, dan untuk menanamkan tentang kemajuan ilmu pengetahuan, perbedaan pendapat, dll.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Dalam Membangun Kota Parepare sebagai Kota Santri yang dijabarkan dalam sub masalah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pesantren di Kota Parepare?

---

<sup>6</sup><https://suarajatappareng.com/2022/03/19/wujud-peduli-keumatan-wali-kota-parepare-sumbangkan-gaji-dan-tunjangan-untuk-pembangunan-pesantren/?amp=1>

2. Bagaimana program penyelenggaraan yang dirancang pemerintah sebelum dan sesudah dalam membangun pesantren di Kota Parepare?
3. Bagaimana strategi penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah dalam membangun pesantren di Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Suatu riset dalam ilmu pengetahuan empiris pada bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pesantren di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui program penyelenggaraan yang dirancang pemerintah sebelum dan sesudah dalam membangun pesantren di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui strategi penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah dalam membangun pesantren di Kota Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun Kota Parepare sebagai kota santri terhadap kinerja pemerintah dan masyarakat khususnya pada bidang studi Hukum Tata Negara guna menciptakan generasi yang berpengalaman.

## 2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah pengetahuan ilmiah dalam studi administrasi dan pembangunan umumnya serta pembangunan bidang kesejahteraan Kota Parepare dalam mewujudkan kota santri.

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, dan sebagai sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kota santri.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi masyarakat Kota Parepare untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim sesuai aturan di dalam Al-Qur'an.

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Kota Parepare sendiri untuk pengembangan penerapan Kota Parepare sebagai Kota santri, sehingga pemerintah Kota Parepare tetap dikenal baik di masyarakat dan sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan Kota Parepare kedepan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah :

Hena Kormalia pada tahun 2022 “Strategi pengembangan santri pondok pesantren Raudlatul Jannah Kecamatan Natar Lampung Selatan tahun 2022”. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi pengembangan santri pondok pesantren Raudlatul Jannah Kecamatan Natar Lampung Selatan tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah yang dijalankan seluruh santri Pondok Pesantren Raudlatul Jannah Kecamatan Natar Lampung Selatan. Sampel diambil sebanyak 15 sampel secara teknik non random dengan sampling kuota.<sup>7</sup>

Nursan pada tahun 2020 “Manajemen Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare Dalam Pembinaan Santri tahun 2020”. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab & Dakwah, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare Dalam Pembinaan Santri tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan fokus penelitian

---

<sup>7</sup>Kormalia Hena “*Strategi Pengembangan Santri Pondok Pesantren Raudlatul Jannah Kecamatan Natar Lampung Selatan tahun 2022*”, (Skripsi Sarjana:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

terhadap manajemen pondok pesantren dalam pembinaan santri di Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare.<sup>8</sup>

Hendi Burahman pada tahun 2021 “Peran Kepemimpinan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Minat Kewirausahaan Santri di Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare tahun 2021”. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepemimpinan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Minat Kewirausahaan Santri di Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare tahun 2021. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dan difokuskan pada santri yang memiliki minat untuk melakukan dan berfokus untuk menjadi wirausahawan.<sup>9</sup>

Ketiga penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan penulis. Yang menjadi pembela antara ketiga penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian, dimana penelitian yang pertama Strategi pengembangan santri pondok pesantren Raudlatul Jannah Kecamatan Natar Lampung Selatan tahun 2022, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dan penelitian kedua membahas mengenai Manajemen Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare Dalam Pembinaan Santri tahun 2020, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ketiga Peran Kepemimpinan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Minat Kewirausahaan Santri di Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare tahun 2021, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

---

<sup>8</sup>Nursan “*Manajemen Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare Dalam Pembinaan Santri Tahun 2020*”, (Skripsi Sarjana:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

<sup>9</sup>Muhammad Nurfadrian “*Peran Kepemimpinan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Minta Kewirausahaan Santri di Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare tahun 2021*”, (Skripsi Sarjana:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).

Sementara pada penelitian ini, penulis fokus pada Urgensi Peran Pemerintah Dalam penyelegaraan pesantren di Kota Parepare dan jenis penelitian adalah kualitatif.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Urgensi Pemerintah**

Urgensi pemerintah biasanya merujuk pada situasi di mana pemerintah harus mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menangani masalah atau kebutuhan mendesak yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti bencana alam, krisis kesehatan, situasi ekonomi yang memburuk, atau ancaman keamanan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari urgensi pemerintah:

#### **a. Respons Darurat**

Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang cepat dan efisien untuk merespons situasi darurat. Ini termasuk penanganan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran hutan, serta krisis kesehatan seperti wabah penyakit menular.

#### **b. Pembuatan Kebijakan Cepat**

Dalam situasi yang mendesak, pemerintah sering kali perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan baru dengan cepat. Misalnya, dalam krisis ekonomi, pemerintah mungkin perlu mengeluarkan paket stimulus ekonomi atau kebijakan fiskal untuk mengatasi dampak negatif terhadap masyarakat dan pasar.

#### **c. Koordinasi Antar Lembaga**

Krisis mendesak biasanya memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan pihak terkait, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta.

Koordinasi yang efektif membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan respons dilakukan secara terintegrasi.

**d. Komunikasi dengan Publik**

Dalam situasi darurat, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik. Komunikasi yang efektif membantu mengurangi kepanikan, mengarahkan sumber daya dengan tepat, dan memastikan bahwa masyarakat mengikuti petunjuk keselamatan.

**e. Pengelolaan Sumber Daya**

Mengelola dan mendistribusikan sumber daya dengan cepat dan efisien merupakan aspek penting dari respons pemerintah. Ini termasuk alokasi dana, pengaturan logistik bantuan, dan penanganan kebutuhan mendesak seperti tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan.

**f. Penilaian dan Evaluasi**

Setelah situasi mendesak ditangani, pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk memahami apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini membantu memperbaiki perencanaan dan respons di masa depan.

**g. Pembuatan Kebijakan Jangka Panjang**

Selain merespons krisis saat ini, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan merancang kebijakan untuk mencegah atau memitigasi risiko di masa depan.

- 1) **Pandemi COVID-19:** Pemerintah di seluruh dunia harus segera mengadopsi kebijakan kesehatan masyarakat, seperti pembatasan perjalanan, karantina, dan peluncuran vaksin secara cepat untuk mengatasi penyebaran virus.

- 2) **Bencana Alam:** Saat terjadi gempa bumi atau tsunami, pemerintah perlu mengerahkan bantuan, melakukan evakuasi, dan memastikan pemulihan infrastruktur dengan segera.

Dalam semua kasus ini, urgensi pemerintah mencerminkan kebutuhan untuk bertindak cepat dan efektif dalam menghadapi tantangan yang mendesak demi melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Teori Kota Madani

Teori kota madani mengacu pada gagasan tentang bagaimana sebuah kota ideal seharusnya diatur dan berfungsi untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik bagi penduduknya.<sup>10</sup> Konsep "kota madani" memiliki asal-usul dari bahasa Arab, yaitu "madina" (مدينة), yang secara harfiah berarti "kota". Namun, dalam konteks yang lebih luas, istilah "kota madani" seringkali digunakan untuk merujuk pada sebuah kota yang memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berbasis pada nilai-nilai kemasyarakatan yang tinggi. Beberapa konsep utama dalam teori ini meliputi:

- a. **Perencanaan Kota:** Pusat dalam teori ini adalah perencanaan yang baik untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien, infrastruktur yang memadai, serta ruang terbuka dan hijau yang cukup untuk penduduk.
- b. **Keterlibatan Masyarakat:** Kota madani menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan kota.

---

<sup>10</sup>Bertens.K,*Masyarakat Madani dan Prinsip Subsidiaritas*. (SuaraPembaharuan: 17 Juli, 1999), h. 97.

- c. Keadilan Sosial: Teori ini menekankan pentingnya adanya keadilan sosial dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di dalam kota, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan.
- d. Keberlanjutan: Konsep keberlanjutan sangat penting dalam teori ini, termasuk pembangunan yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.
- e. Perekonomian yang Berkembang: Kota madani harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penduduk, dan mempromosikan inovasi ekonomi.
- f. Infrastruktur dan Aksesibilitas: Infrastruktur yang baik dan aksesibilitas yang memadai ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi merupakan aspek krusial dalam teori ini.
- g. Kebudayaan dan Identitas: Mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya serta identitas lokal merupakan bagian integral dari kota madani yang berhasil.

Teori kota madani menggabungkan elemen-elemen ini untuk menciptakan lingkungan kota yang berfungsi dengan baik, memberikan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya, dan mempromosikan inklusivitas serta keberlanjutan. Teori ini terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan global.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Bertens.K,*Masyarakat Madani dan Prinsip Subsidiaritas*. (SuaraPembaharuan: 17 Juli, 1999), h. 98.

Di Indonesia, konsep "kota madani" tidak secara eksplisit diatur dalam satu undang-undang tertentu. Namun, beberapa kriteria dan prinsip kota madani dapat dilihat dalam berbagai kebijakan pemerintah dan inisiatif lokal di beberapa kota di Indonesia. Berikut beberapa contoh kota di Indonesia yang dapat dianggap memiliki ciri-ciri kota madani berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya:

- a. Bandung: Bandung sering dianggap sebagai contoh kota madani di Indonesia. Kota ini dikenal karena upaya pemerintahannya dalam membangun transportasi umum yang terintegrasi (seperti Trans Bandung Raya), mempromosikan kebudayaan dan seni, serta meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan melalui berbagai forum partisipatif.
- b. Surabaya: Surabaya adalah salah satu kota yang terkenal dengan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola kota dan membangun infrastruktur yang memadai. Pemerintah kota Surabaya juga aktif dalam memperhatikan kebersihan kota, meningkatkan ruang publik, dan memfasilitasi partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan kota.
- c. Yogyakarta: Yogyakarta merupakan kota yang kaya akan budaya dan seni, dengan komunitas yang kuat dalam menjaga nilai-nilai tradisional dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan kota. Pemerintah Kota Yogyakarta juga fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian warisan budaya.
- d. Jakarta: Meskipun Jakarta memiliki banyak tantangan, kota ini terus berusaha untuk menjadi kota madani dengan berbagai program peningkatan infrastruktur transportasi, revitalisasi sungai dan ruang terbuka hijau, serta pembangunan fasilitas umum yang memadai bagi seluruh warga Jakarta.

- e. Denpasar: Ibukota Provinsi Bali ini juga berupaya menjadi kota madani dengan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan infrastruktur publik seperti transportasi, ruang terbuka hijau, dan memperhatikan kebudayaan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.

Meskipun tidak ada definisi yang pasti atau hukum yang secara khusus mengatur kota madani di Indonesia, beberapa kriteria dan prinsip kota madani telah diterapkan dan dilaksanakan dalam berbagai kebijakan di kota-kota tersebut. Hal ini mencakup aspek keberagaman budaya, inklusi sosial, partisipasi publik, keberlanjutan lingkungan, serta pemerintahan yang efektif dan transparan.

Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur atau menetapkan konsep "kota madani menjadi kota santri" secara langsung. Konsep "kota madani" sendiri lebih merupakan visi atau idealisasi terkait pembangunan kota yang modern, berkeadilan, dan beradab. Sementara "kota santri" merujuk pada kota yang memiliki pesantren atau lembaga pendidikan agama Islam yang kuat.

Namun demikian, ada beberapa regulasi atau kebijakan yang relevan yang dapat mempengaruhi atau mendukung konsep kota madani yang menjadi kota santri, seperti:

- a. Perda atau Kebijakan Daerah tentang Pendidikan:

Beberapa daerah di Indonesia mungkin memiliki peraturan daerah (Perda) atau kebijakan lokal yang mendukung pendidikan agama Islam, termasuk regulasi terkait dengan pengelolaan pesantren atau sekolah-sekolah agama.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk pendidikan nasional di Indonesia, termasuk pendidikan agama dan pengakuan terhadap peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang dan pembangunan di wilayahnya, yang dapat mencakup pembangunan kawasan pesantren atau pengembangan infrastruktur pendukung untuk lembaga-lembaga pendidikan agama.

d. Program dan Kebijakan Pemerintah Pusat atau Daerah:

Beberapa program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mungkin memiliki fokus pada pengembangan kota yang mendukung identitas keagamaan, termasuk pengembangan kota santri atau kota yang ramah terhadap kegiatan keagamaan.

Namun demikian, untuk lebih mendalaminya, Anda perlu mengakses dokumen-dokumen hukum resmi seperti Peraturan Daerah (Perda), Undang-undang, atau kebijakan pemerintah terkait di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Ini penting untuk memahami secara langsung regulasi yang ada dan bagaimana penerapannya dalam mendukung konsep kota madani menjadi kota santri di Indonesia.

### 3. Teori Kota Religius

Teori kota religius adalah konsep perencanaan dan pengembangan kota yang menekankan pentingnya agama dalam pengaturan sosial, budaya, dan politik di dalam kota.<sup>12</sup> Berikut adalah beberapa poin utama yang terkait dengan teori kota religius:

- a. Pusat Keagamaan: Teori ini menempatkan pusat keagamaan sebagai titik fokus kota, dengan bangunan-bangunan seperti kuil, gereja, masjid, atau tempat ibadah lainnya menjadi elemen pusat kota yang penting secara fisik dan simbolis.
- b. Norma dan Nilai Agama: Kota religius didasarkan pada penerapan norma dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari penduduknya. Hal ini dapat mencakup aspek-aspek seperti etika, moralitas, dan kegiatan sosial yang dipandu oleh ajaran agama. Pemberdayaan Komunitas Agama: Teori ini mendorong partisipasi aktif komunitas agama dalam pengambilan keputusan kota, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya kota. Komunitas agama dianggap sebagai mitra penting dalam membangun dan memelihara keharmonisan sosial.
- c. Arsitektur dan Penataan Kota: Arsitektur dan penataan kota dalam teori ini sering kali mencerminkan nilai-nilai agama, baik dalam desain bangunan, tata letak ruang publik, maupun dalam penggunaan simbol-simbol agama dalam seni dan arsitektur kota.
- d. Pendidikan dan Penyebaran Nilai Agama: Kota religius sering kali memiliki sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai agama, baik melalui

---

<sup>12</sup>Ahsanulhaq, Moh. *Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan*. (Jurnal Prakarsa Paedagogia, 2019), h. 2(1), 21.

sekolah agama, program pendidikan khusus, atau integrasi nilai-nilai agama dalam kurikulum sekuler.

- e. Keberagaman Religius: Meskipun fokus utamanya pada satu agama atau beberapa agama utama, teori kota religius mengakui keberagaman religius dan berusaha untuk mempromosikan toleransi antaragama serta kerukunan antarumat beragama.
- f. Pengembangan Spiritualitas dan Kehidupan Rohani: Teori ini mengakui pentingnya pengembangan aspek spiritual dan kehidupan rohani dalam kesejahteraan penduduk kota, termasuk fasilitas dan program-program untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat.

Teori kota religius dapat berbeda-beda tergantung pada konteks budaya, agama dominan, dan tujuan pembangunan kota. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kota yang mendukung dan mempromosikan praktik agama, nilai-nilai spiritual, serta kehidupan beragama yang bermakna bagi penduduknya.<sup>13</sup>

Konsep "kota religius" merujuk pada sebuah kota atau wilayah yang memiliki ciri khas atau identitas kuat yang berkaitan erat dengan agama tertentu atau kehidupan spiritual yang intens. Kota religius sering kali dianggap sebagai pusat penting bagi pengikut agama tersebut, dengan infrastruktur dan kegiatan sehari-hari yang tercermin dari nilai-nilai keagamaan dan kehidupan rohani yang dominan di sana.

Beberapa ciri umum dari kota religius termasuk:

1. Pusat Ibadah dan Perayaan Keagamaan: Kota religius sering memiliki bangunan-bangunan suci atau tempat ibadah yang penting bagi umat agama

---

<sup>13</sup>Ahsanulhaq, Moh. *Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan*. (Jurnal Prakarsa Paedagogia, 2019), h. 2(1), 21–33.

tersebut. Misalnya, gereja, kuil, masjid, atau situs suci lainnya yang menjadi pusat peribadatan dan perayaan keagamaan.

2. Kehidupan Sehari-hari yang Terpengaruh oleh Agama: Nilai-nilai agama mempengaruhi banyak aspek kehidupan di kota religius, seperti norma-norma sosial, adat istiadat, dan aturan-aturan kehidupan sehari-hari.
3. Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan: Kota religius sering memiliki komunitas yang kuat dan aktif dalam kegiatan sosial, pelayanan kemanusiaan, dan kegiatan amal yang didasarkan pada ajaran agama mereka.
4. Pendidikan Agama dan Kebudayaan: Pendidikan agama dan kebudayaan agama sering ditekankan di kota religius, dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pusat kebudayaan yang didedikasikan untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi keagamaan.

Contoh kota-kota religius di berbagai belahan dunia termasuk:

1. Mekah, Arab Saudi: Sebagai tempat suci dalam agama Islam, Mekah adalah tujuan ziarah yang penting bagi umat Islam dari seluruh dunia.
2. Vatican City, Vatikan: Merupakan pusat gerejawi bagi Gereja Katolik Roma, dengan Basilika Santo Petrus dan Museum Vatikan yang merupakan pusat spiritual dan kebudayaan Katolik.
3. Varanasi, India: Dianggap sebagai salah satu kota suci dalam agama Hindu, dengan sungai Gangga yang dianggap suci dan tempat utama untuk perayaan keagamaan dan ritual.
4. Jerusalem, Israel: Kota suci bagi tiga agama besar dunia (Yudaisme, Kristen, dan Islam), dengan tempat-tempat suci seperti Tembok Ratapan, Gereja Makam Kudus, dan Masjid Al-Aqsa.

5. Lourdes, Prancis: Terkenal sebagai tempat ziarah Katolik yang penting, di mana banyak umat Katolik pergi untuk mencari penyembuhan spiritual dan fisik.

Kota-kota religius ini menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan sejarah suatu tempat, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan mempengaruhi tata kota dan identitas budaya dari waktu ke waktu.

Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur atau menetapkan konsep "kota religius" secara langsung. Namun demikian, ada beberapa regulasi atau kebijakan yang relevan yang dapat mendukung atau mempengaruhi pembangunan kota dengan karakter religius atau spiritual, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang dan pembangunan di wilayahnya. Beberapa daerah mungkin mengembangkan konsep kota dengan pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sebagai bagian dari identitas kota tersebut.

- b. Peraturan Daerah (Perda):

Beberapa daerah mungkin memiliki Perda yang mengatur tentang kegiatan keagamaan, pengelolaan tempat ibadah, atau perlindungan terhadap kebebasan beragama. Perda semacam ini dapat mencerminkan upaya untuk menjadikan kota sebagai tempat yang ramah terhadap praktik keagamaan dan nilai-nilai spiritual masyarakatnya.

c. Kebijakan Pembangunan Kota:

Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan atau spiritual dalam pengembangan infrastruktur, tata ruang, dan fasilitas umum. Ini dapat mencakup pembangunan tempat ibadah, peningkatan aksesibilitas fasilitas keagamaan, atau pengembangan kawasan-kawasan khusus yang mendukung aktivitas keagamaan.

d. Program Pemerintah Pusat atau Daerah:

Beberapa program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mungkin memiliki fokus pada pengembangan kota yang menghargai dan mendukung pluralitas keagamaan serta nilai-nilai spiritual masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa implementasi konsep "kota religius" dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat. Untuk memahami lebih lanjut tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kota dengan karakter religius di Indonesia, dianjurkan untuk mengakses dokumen-dokumen resmi seperti Perda, kebijakan pemerintah daerah, atau berdiskusi langsung dengan pihak terkait di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang bersangkutan.

#### **4. Teori Kebijakan Publik**

Teori kebijakan publik adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami proses pembuatan keputusan dalam konteks kebijakan publik. Teori-teori ini membahas bagaimana kebijakan publik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi oleh pemerintah dan institusi-institusi terkait.

Beberapa teori kebijakan publik yang terkenal antara lain:

- a. Model Pembuatan Kebijakan Rasional: Model ini menekankan bahwa pembuat kebijakan menggunakan pendekatan rasional untuk merumuskan kebijakan yang optimal. Pembuat kebijakan mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif kebijakan, dan memilih kebijakan yang memberikan hasil terbaik berdasarkan tujuan yang ditetapkan.
- b. Model Proses Pembuatan Kebijakan: Model ini melihat proses pembuatan kebijakan sebagai serangkaian langkah yang kompleks, termasuk agenda setting (penetapan agenda), perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai aktor, kepentingan, dan institusi dalam sistem politik.
- c. Model Teori Sosial: Model ini menyoroti peran struktur sosial dan politik dalam pembuatan kebijakan. Teori-teori ini mengakui bahwa kebijakan publik sering kali merupakan hasil dari negosiasi dan interaksi antara berbagai kelompok masyarakat, serta dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan kepentingan politik.
- d. Teori Pilihan Rasional: Teori ini menekankan bahwa individu dan kelompok menggunakan kalkulasi rasional untuk memilih kebijakan yang paling menguntungkan bagi mereka secara pribadi. Teori ini mengasumsikan bahwa aktor-aktor dalam proses kebijakan memiliki informasi yang lengkap dan memilih tindakan yang paling konsisten dengan preferensi mereka.
- e. Teori Kebijakan Inkremental: Teori ini menggambarkan proses pembuatan kebijakan sebagai evolusi bertahap dari kebijakan yang sudah ada. Perubahan dalam kebijakan cenderung bersifat inkremental (bertahap) daripada

revolusioner, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuatan politik, kepentingan kelompok, dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.

Setiap teori kebijakan publik memiliki pendekatan yang berbeda terhadap proses pembuatan kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penggunaan teori-teori ini dapat membantu dalam analisis, perumusan, dan evaluasi kebijakan publik.

### 5. Teori Tata Kelola (Governance)

Teori tata kelola (governance) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana pemerintahan dan lembaga-lembaga lain mengelola kegiatan mereka serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Teori ini berfokus pada berbagai aspek tata kelola, termasuk pengambilan keputusan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi. Beberapa teori tata kelola yang terkenal meliputi:

- a. **Tata Kelola Korporat:** Teori ini berkaitan dengan cara perusahaan dikelola dan diawasi oleh dewan direksi dan pemangku kepentingan lainnya. Fokus utamanya adalah pada pengelolaan risiko, ketaatan terhadap peraturan, dan penciptaan nilai bagi pemegang saham.
- b. **Tata Kelola Sektor Publik:** Teori ini membahas bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya mengelola urusan publik dan menjalankan kebijakan publik. Hal ini mencakup aspek seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efisiensi pengelolaan sumber daya publik.
- c. **Tata Kelola Global:** Teori ini mengacu pada tata kelola dalam konteks hubungan antar-negara dan lembaga-lembaga internasional. Hal ini mencakup isu-isu seperti perdagangan internasional, lingkungan global, hak asasi manusia, dan pembangunan internasional.

- d. **Tata Kelola Lembaga Keuangan:** Teori ini berkaitan dengan cara lembaga keuangan seperti bank dan pasar modal diatur, diawasi, dan dijalankan. Fokusnya termasuk manajemen risiko, kepatuhan peraturan, transparansi, dan kinerja keuangan.
- e. **Tata Kelola Non-Pemerintah (NGO):** Teori ini mengacu pada cara organisasi non-pemerintah (NGO) diatur dan dijalankan. Hal ini mencakup aspek seperti partisipasi anggota, akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, dan dampak sosial atau lingkungan dari kegiatan organisasi tersebut.

Tata kelola yang baik dianggap penting untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau entitas, baik itu perusahaan, pemerintah, atau organisasi non-pemerintah. Teori-teori tata kelola memberikan landasan untuk merancang praktik-praktik terbaik dalam mengelola entitas tersebut dengan baik dan bertanggung jawab.

## 6. Teori Pembangunan

Teori pembangunan adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami proses pertumbuhan, perubahan, dan transformasi dalam suatu masyarakat. Teori-teori ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam konteks negara-negara berkembang maupun negara-negara maju.

Beberapa teori pembangunan yang terkenal antara lain:

- a. **Modernisasi:** Teori ini menekankan bahwa pembangunan terjadi melalui transformasi sosial, ekonomi, dan politik dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Faktor-faktor seperti industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi institusi dianggap sebagai kunci keberhasilan pembangunan.

- b. **Dependensi:** Teori ini menyoroti ketidaksetaraan dan ketergantungan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Negara-negara
- c. berkembang dianggap menjadi tergantung pada negara-negara maju dalam hal perdagangan, teknologi, dan investasi.
- d. **Sistem Dunia:** Teori ini berfokus pada hubungan antara negara-negara di tingkat global dan bagaimana struktur global mempengaruhi pembangunan nasional. Teori ini menekankan peran kapitalisme global dan pengaruhnya terhadap negara-negara berkembang.
- e. **Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia:** Pendekatan ini menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dianggap hanya dapat dicapai jika hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik, dihormati dan diperjuangkan.
- f. **Pendekatan Berbasis Keadilan Sosial:** Pendekatan ini menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan. Distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan dianggap penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Setiap teori pembangunan memiliki sudut pandang dan pendekatan yang berbeda terhadap proses pembangunan, dan seringkali digunakan untuk merancang kebijakan pembangunan nasional dan internasional.

## 7. Teori Sosiologi Politik Islam

Teori sosiologi politik Islam merupakan pendekatan dalam studi ilmu politik dan sosiologi yang fokus pada hubungan antara agama Islam, politik, dan masyarakat.

<sup>14</sup>Teori ini mencoba untuk memahami bagaimana nilai-nilai, ajaran, dan institusi Islam mempengaruhi dinamika politik dalam masyarakat Muslim. Berikut beberapa poin utama terkait dengan teori sosiologi politik Islam:

- a. **Kekuasaan dan Legitimasi:** Teori ini mempertimbangkan bagaimana agama Islam memberikan legitimasi kepada otoritas politik. Konsep keadilan sosial, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan kewajiban moral yang dianggap sebagai elemen utama dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
- b. **Pemerintahan dan Kebijakan Publik:** Fokus teori ini termasuk bagaimana prinsip-prinsip Islam mempengaruhi struktur pemerintahan, proses pembuatan keputusan, dan kebijakan publik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
- c. **Identitas dan Solidaritas Umat:** Sosiologi politik Islam mempertimbangkan bagaimana ajaran Islam membentuk identitas kolektif dan solidaritas di antara umat Muslim, serta dampaknya terhadap integrasi politik dan sosial.
- d. **Perlawanan dan Gerakan Sosial:** Teori ini juga memeriksa peran agama Islam dalam membangkitkan gerakan politik, baik yang pro-regim maupun oposisi. Ini termasuk analisis tentang peran Islam dalam gerakan sosial, hak asasi manusia, demokratisasi, dan perubahan politik.
- e. **Hubungan Negara dan Agama:** Teori sosiologi politik Islam mengeksplorasi hubungan dinamis antara negara dan agama dalam konteks negara-negara dengan mayoritas Muslim, termasuk pertanyaan tentang sejauh mana negara harus menerapkan prinsip-prinsip agama dalam hukum dan kebijakan publiknya.

---

<sup>14</sup>Chaniago, Andriano A. *Teori Politik Modern*.(Jakarta :Rajawali Pers, 2010), h. 83.

**f. Globalisasi dan Islamisme:** Dalam era globalisasi, teori ini mengkaji bagaimana pergerakan politik Islamisme beradaptasi dengan modernitas dan globalisasi, serta respons terhadap isu-isu global seperti perdagangan, hak asasi manusia, dan konflik internasional.

**g. Transformasi Sosial dan Kultural:** Teori ini juga mempertimbangkan dampak Islam dalam mengubah tatanan sosial dan budaya dalam masyarakat Muslim, termasuk dalam hal keluarga, pendidikan, gender, dan ekonomi.

Teori sosiologi politik Islam sangat penting dalam memahami dinamika politik di dunia Muslim kontemporer dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi global. Pendekatan ini membantu melihat bagaimana nilai-nilai agama dapat memengaruhi tata kelola politik, struktur kekuasaan, serta aspirasi dan gerakan politik di dunia Muslim saat ini.<sup>15</sup>

Teori sosiologi politik Islam adalah cabang dalam ilmu sosiologi yang mempelajari interaksi antara aspek politik dalam masyarakat dan nilai-nilai, doktrin, serta prinsip-prinsip dalam Islam. Berbagai teori sosiologi politik Islam dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana agama Islam mempengaruhi dinamika politik dan sosial dalam masyarakat Muslim. Berikut beberapa contoh teori sosiologi politik Islam yang relevan:

a. Teori Negara dalam Islam:

Salah satu aspek utama dalam teori sosiologi politik Islam adalah pandangan terhadap negara dalam perspektif Islam. Beberapa teori mengemukakan bahwa negara dalam Islam seharusnya berdasarkan pada

---

<sup>15</sup>Chaniago, Andriano A. *Teori Politik Modern*.(Jakarta :Rajawali Pers, 2010), h. 85.

prinsip-prinsip syariah, yang mengatur tidak hanya aspek hukum, tetapi juga keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan moralitas.

b. Teori Kekuasaan dan Otoritas:

Teori sosiologi politik Islam juga membahas konsep kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat Muslim. Hal ini mencakup studi tentang bagaimana pemimpin politik mendapatkan legitimasi, bagaimana struktur kekuasaan dalam Islam didefinisikan (misalnya, konsep kepemimpinan seperti khilafah atau imamah), dan bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat diatur.

c. Teori Partisipasi Politik dan Peran Perempuan:

Teori ini mencakup analisis tentang partisipasi politik umat Islam dalam berbagai konteks, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ini juga mempertimbangkan peran perempuan dalam politik Islam, baik dari segi hak politik maupun partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

d. Teori Gerakan Sosial dan Politik Islam:

Teori ini mengkaji berbagai gerakan sosial dan politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, seperti gerakan dakwah, gerakan keadilan sosial, gerakan Islam politik, dan gerakan-gerakan lain yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks sosial dan politik.

e. Teori Islam dan Demokrasi:

Teori ini membahas hubungan antara Islam dan demokrasi, serta bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dapat diinterpretasikan dalam kerangka pemikiran Islam. Ini termasuk studi tentang pemilu, pluralisme politik,

kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim.

Contoh-contoh teori sosiologi politik Islam ini membantu memahami berbagai dinamika politik dan sosial di dunia Muslim, serta bagaimana nilai-nilai agama dan prinsip Islam mempengaruhi sistem politik dan kehidupan sosial dalam masyarakat yang menganut agama Islam.

### 8. Teori Antropologi Politik

Teori antropologi politik memandang peran tokoh agama sebagai sangat penting dalam membentuk dan mempengaruhi sistem politik serta dinamika sosial dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Teori antropologi politik merupakan cabang dari antropologi sosial dan budaya yang mempelajari hubungan antara struktur politik, kekuasaan, dan budaya dalam masyarakat manusia. Secara umum, teori ini berfokus pada bagaimana kehidupan politik suatu masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, tradisi, struktur sosial, dan dinamika interaksi antarindividu. Berikut ini beberapa cara teori antropologi politik menjelaskan peran tokoh agama:

- a. **Simbolisme dan Otoritas Spiritual:** Tokoh agama sering kali memiliki otoritas spiritual yang besar dalam komunitas mereka. Mereka dihormati dan dianggap memiliki akses kepada pengetahuan atau kekuatan supranatural,

---

<sup>16</sup>Morris, Brian, *Antropologi Agama: Kritik Teori-teori Agama Kontemporer: diterjemahkan oleh Imam Khoiri*, (Yogyakarta: AK Group, 2003), h.121.

yang memberi mereka pengaruh yang signifikan dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan praktik sosial dalam masyarakat.

- b. **Kekuatan Moral dan Etika:** Tokoh agama sering bertindak sebagai pengawas moral dalam masyarakat, mengartikulasikan dan mempromosikan nilai-nilai etika yang dianggap penting bagi kehidupan bersama. Mereka dapat mempengaruhi perilaku politik dan sosial dengan menegaskan kepatuhan terhadap norma-norma agama dalam pengambilan keputusan publik dan perilaku individu.
- c. **Mediator dalam Konflik:** Tokoh agama sering berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial dan politik. Dengan otoritas moral dan kepercayaan dari para pengikut mereka, mereka dapat membantu memediasi perselisihan antar kelompok atau individu dalam masyarakat.
- d. **Pengorganisasi Sosial dan Mobilisasi:** Tokoh agama dapat memobilisasi dukungan politik dari masyarakat mereka untuk tujuan-tujuan tertentu, baik dalam konteks kampanye politik, gerakan sosial, atau aksi kolektif lainnya. Mereka sering menjadi pusat dalam pengorganisasi dan penyatuan komunitas dalam upaya politik atau sosial.
- e. **Pengaruh terhadap Kebijakan Publik:** Dalam beberapa kasus, tokoh agama memiliki pengaruh langsung dalam pembuatan kebijakan publik. Mereka dapat berperan dalam proses konsultasi atau sebagai penasihat bagi para pembuat kebijakan, terutama dalam masalah-masalah yang secara langsung terkait dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip agama mereka.
- f. **Legitimasi Politik:** Kehadiran dan dukungan tokoh agama sering dianggap penting untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi politik, terutama

di masyarakat yang nilai-nilai agama masih sangat kuat. Kehadiran mereka dapat memberikan legitimasi tambahan bagi pemimpin politik atau struktur kekuasaan lainnya.

- g. **Penyampaian Aspirasi dan Harapan Masyarakat:** Tokoh agama sering berperan sebagai pembawa aspirasi dan harapan masyarakat dalam konteks politik. Mereka bisa menjadi suara bagi kelompok-kelompok marginal atau terpinggirkan, serta memperjuangkan hak-hak mereka di panggung politik.

Dengan demikian, teori antropologi politik memandang peran tokoh agama sebagai integral dalam membentuk struktur politik dan dinamika sosial dalam masyarakat. Pengaruh mereka dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan sosial, namun secara konsisten mereka memainkan peran penting dalam membentuk identitas kolektif, nilai-nilai, serta praktek politik dan sosial dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Teori antropologi politik merupakan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara struktur politik, kekuasaan, dan budaya dalam masyarakat manusia. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana institusi politik terbentuk, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi dinamika politik dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh teori antropologi politik yang relevan:

---

<sup>17</sup>Morris, Brian, *Antropologi Agama: Kritik Teori-teori Agama Kontemporer: diterjemahkan oleh Imam Khoiri*, (Yogyakarta: AK Group, 2003), h.122.

a. Teori Sistem Politik dalam Masyarakat Tradisional:

Teori ini mengkaji struktur politik dalam masyarakat tradisional di mana kekuasaan dan otoritas sering kali terpusat pada pemimpin adat atau kelompok yang dihormati. Contohnya, teori tentang "big man" dalam masyarakat Papua Nugini, di mana seorang pemimpin (big man) membangun jaringan politik dan ekonomi berdasarkan pada pengaruh pribadi dan kepemimpinan karismatik.

b. Teori Klientelisme dan Patronase:

Teori ini mempelajari sistem politik di mana hubungan antara penguasa dan rakyatnya didasarkan pada pertukaran sumber daya atau dukungan politik. Contohnya, teori tentang patronase dalam politik di beberapa negara-negara Afrika atau Amerika Latin, di mana penguasa atau elit politik memberikan perlindungan atau manfaat kepada pendukung mereka sebagai imbalan atas dukungan politik.

c. Teori Kekuasaan Struktural:

Teori ini menyoroti bagaimana kekuasaan politik terintegrasi dalam struktur sosial yang lebih luas. Contohnya, teori tentang hegemoni dalam karya Antonio Gramsci, di mana kekuasaan elit politik juga didasarkan pada dominasi budaya dan ideologi, bukan hanya kekuatan fisik atau ekonomi semata.

d. Teori Negara dan Pembentukan Identitas:

Teori ini mempelajari bagaimana negara modern mempengaruhi pembentukan identitas politik dan kebangsaan dalam masyarakat. Contoh dari teori ini adalah analisis tentang konstruksi nasionalisme di Eropa pada abad ke-19 atau studi tentang konflik etnis di negara-negara bekas Yugoslavia setelah keruntuhan Uni Soviet.

e. Teori Gerakan Sosial dan Politik:

Teori ini mengkaji bagaimana gerakan sosial muncul dan beroperasi dalam masyarakat untuk mengubah atau menentang kebijakan politik. Contohnya, teori tentang gerakan hak sipil di Amerika Serikat atau gerakan feminis di banyak negara, yang menggunakan strategi politik untuk mencapai perubahan sosial dan politik.

Setiap teori antropologi politik menawarkan sudut pandang yang unik untuk memahami dinamika politik dalam masyarakat manusia, dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antara kekuasaan, budaya, identitas, dan institusi sosial. Teori-teori ini membantu untuk menganalisis berbagai fenomena politik dari berbagai konteks sosial, budaya, dan sejarah.

### C. Tinjauan Konseptual

Agar penelitian ini memperoleh titik dan tidak menimbulkan multitafsir dalam mengkaji tentang Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Parepare Menjadi Kota Santri, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Teori kota madani mengacu pada gagasan tentang bagaimana sebuah kota ideal seharusnya diatur dan berfungsi untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik bagi penduduknya.<sup>18</sup>
2. Teori kota religius adalah konsep perencanaan dan pengembangan kota yang menekankan pentingnya agama dalam pengaturan sosial, budaya, dan politik di dalam kota.<sup>19</sup>
3. Teori analisis multilevel governance (MLG) merujuk pada pendekatan dalam ilmu politik dan administrasi publik yang mempelajari dinamika dan interaksi antara berbagai tingkat pemerintahan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.<sup>20</sup>
4. Teori sosiologi politik Islam merupakan pendekatan dalam studi ilmu politik dan sosiologi yang fokus pada hubungan antara agama Islam, politik, dan masyarakat.<sup>21</sup>Teori ini mencoba untuk memahami bagaimana nilai-nilai, ajaran, dan institusi Islam mempengaruhi dinamika politik dalam masyarakat Muslim.

---

<sup>18</sup>Bertens.K,*Masyarakat Madani dan Prinsip Subsidiaritas*. (SuaraPembaharuan: 17 Juli, 1999), h. 97.

<sup>19</sup>Ahsanulhaq, Moh. *Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan*. (Jurnal Prakarsa Paedagogia, 2019), h. 2(1), 21.

<sup>20</sup> Santosa, Pandji. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good governance*. (PT. Refika Aditama. Bandung, 2008), h. 125.

<sup>21</sup>Chaniago, Andriano A. *Teori Politik Modern*.(Jakarta :Rajawali Pers, 2010), h. 83.

5. Teori antropologi politik memandang peran tokoh agama sebagai sangat penting dalam membentuk dan mempengaruhi sistem politik serta dinamika sosial dalam masyarakat.<sup>22</sup>

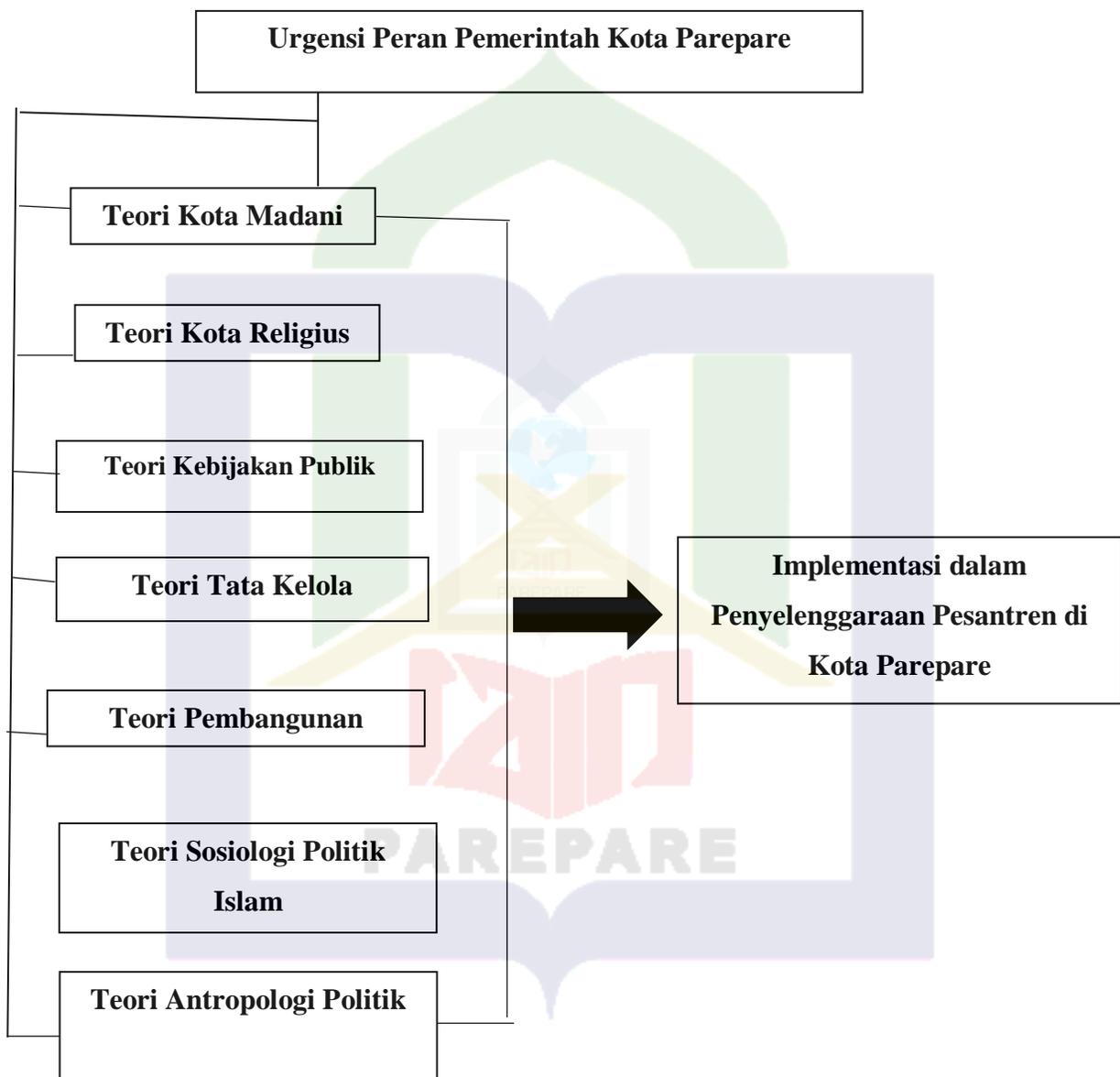
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksudkan penulis dalam judul “Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Parepare Menjadi Kota Santri” adalah menyelidiki dengan sebenarnya tentang Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Parepare Menjadi Kota Santri, dan khususnya pada Kota Parepare itu sendiri.



---

<sup>22</sup>Morris, Brian, *Antropologi Agama: Kritik Teori-teori Agama Kontemporer: diterjemahkan oleh Imam Khoiri*, (Yogyakarta: AK Group,2003), h.121.

#### D. Bagan Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>23</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

1. Lokasi penelitian Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Jl. Jendral Sudirman No.37, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91121.
2. Waktu penelitian yang digunakan peneliti di dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian sekurang-kurangnya menggunakan waktu selama dua bulan.

#### **C. Fokus penelitian**

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana urgensi Peran Pemerintah Kota Parepare, untuk penyelenggaraan pesantren di Kota Parepare. Mewujudkan Kota Santri tersebut adalah Peran Pemerintah yang telah diterapkan di Kota Parepare.

---

<sup>23</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.22.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara dan observasi partisipatif yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada Dinas terkait di Kota Parepare.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia sebelumnya sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain.)

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

- a. Kepustakaan
- b. Internet
- c. Artikel
- d. Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian atau dengan kata lain penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan

---

<sup>24</sup> Hilmah Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum ( Bandung; Alfabeta, 1995 ), h. 65 .

memperoleh data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini antara lain :

1. Observasi

Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.<sup>25</sup> Pengamatan ilmiah berfokus pada gejala, peristiwa, atau gejala yang bertujuan untuk menafsirkannya, mengidentifikasi faktor penyebab, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Parepare Menjadi Kota Santri kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi untuk mengamati peran pemerintah dalam mewujudkan Kota Santri di Kota Parepare. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

2. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara

---

<sup>25</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

dengan cara tatap muka, adapun informasi dalam penelitian ini adalah ketua pesantren di kota parepare dan santri di kota parepare.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan<sup>26</sup>. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>27</sup>

### E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transaksi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang sudah temukan kepada orang lain. Analisa melibatkan pekerjaan dengan data, penyajian, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan anda katakana kepada orang lain. Untuk sebagian besar, rproduksi akhir dari penelitian adalah buku, makalah, presentasi atau rencana tindakan. Analisis data menggerakkan anda dari pembenahan halaman-

---

<sup>26</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipt, 2008), h. 158.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, h. 329.

halaman deskripsi ke produk tersebut.<sup>28</sup> Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman yang dimaksud dengan mereduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kota santri dan cara mengatasi kendala dalam mewujudkan Kota Parepare menjadi Kota Santri.<sup>29</sup>

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.<sup>30</sup> Data yang disajikan dalam bentuk informasi mengenai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kota santri

---

<sup>28</sup>Emzir, *“Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data”*, (ed.1-Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 40.

<sup>29</sup>Arum Prabandari, *“Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman”* (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial: 2015), h. 34.

<sup>30</sup>Djam’an Salori dan Aan Komariah, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2019.

dengan dimanfaatkannya teknologi informasi dan cara mengatasi kendala jika terjadi permasalahan dalam mewujudkan Kota Parepare menjadi Kota Santri.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan membantu untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini maka akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah yaitu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kota parepare menjadi kota santri melalui peran pemerintah di Kota Parepare. Peran pemerintah tersebut menunjukkan bagaimana mewujudkan Kota Parepare ini menjadi Kota Santri bagi masyarakat.

---

<sup>31</sup>Arum Prabandari, "Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman", (Universitas Negeri Yogyakarta: 2015), h. 35.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Membangun Kota Parepare Sebagai Kota Santri

###### a. Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Kota Santri

Kebijakan pemerintah dalam membangun kota santri merupakan upaya untuk memperkuat dan mengembangkan kawasan yang mendukung pendidikan agama Islam dan kehidupan santri secara berkelanjutan.

Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan bapak H. Muh Amin sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Kota Parepare sebagai berikut:

“Sebagai aparat Kementerian Agama, saya mengetahui bahwa program pemerintah dalam membangun Kota Santri merupakan salah satu rencana jangka panjang yang direncanakan selama periode kepemimpinan Walikota Taufan Pawe dari periode pertama hingga periode kedua. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan Parepare sebagai kota santri yang menarik peserta didik atau calon santri dari luar daerah ke Parepare, serta mengintegrasikan pendidikan pesantren ke dalam sistem pendidikan formal baik negeri maupun swasta di kota Parepare, yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun oleh Kementerian Agama.”<sup>32</sup>

Beberapa strategi yang biasanya diterapkan dalam kebijakan ini meliputi:

- 1) **Pengembangan Pendidikan Agama:** Mendorong pendirian dan pengembangan pondok pesantren serta sekolah-sekolah agama Islam yang

---

<sup>32</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

berkualitas. Hal ini termasuk pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan tenaga pendidik, dan penyediaan sumber daya pendukung lainnya.

- 2) **Infrastruktur**: Memperbaiki dan membangun infrastruktur kota santri seperti jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, dan listrik yang memadai untuk mendukung kehidupan santri dan masyarakat sekitar.
- 3) **Pengelolaan dana atau anggaran** : Pengelolaan dana atau anggaran ini perlu dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para santri dan penduduk lokal. Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, pembangunan kota santri dapat menjadi contoh bagi pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Kota Parepare.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sabriah, salah satu pegawai di Kantor Statistik Kota Parepare, mengenai pengelolaan dana atau anggaran khusus untuk pembangunan pesantren di Kota Parepare sebagai Kota Santri adalah sebagai berikut:

“Saya kurang mengetahui detailnya, tetapi pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan pengadaan infrastruktur lainnya tampaknya sudah cukup baik.”<sup>33</sup>

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan agama Islam yang berkualitas, pengembangan potensi santri, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat secara keseluruhan. Dengan

---

<sup>33</sup>Sabriah,S.E, *Salah Satu Pegawai Kementerian Agama Kota Parepare*, Kantor Statistik Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Statistik Kota Parepare, 16 Juli 2024.

demikian, kota santri diharapkan dapat menjadi pusat keilmuan, spiritualitas, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Program pemerintah Kota Parepare yang menjadi sasaran dalam mewujudkan kota santri adalah peserta didik atau calon santri yang ada diluar daerah Kota Parepare maupun yang ada didalam Kota Parepare.

b. Landasan Pemerintah untuk Mewujudkan Program dalam Membangun Kota Santri

Program pembangunan kota santri didasarkan pada beberapa landasan dan tujuan strategis yang menjadi fokus pemerintah dalam mengembangkan kawasan-kawasan yang berorientasi pada pendidikan agama Islam dan kehidupan santri.

- 1) **Pengembangan Potensi Lokal:** Pemerintah mendorong pengembangan potensi lokal dan kearifan lokal dalam konteks Islam dan budaya lokal. Hal ini termasuk pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal untuk mendukung pembangunan kota santri yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
- 2) **Pengarusutamaan Aspek Sosial:** Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan aspek sosial dan kebersamaan antara masyarakat santri dan masyarakat umum di sekitarnya. Ini dilakukan melalui program-program sosial, keagamaan, dan budaya yang memperkuat solidaritas dan integrasi sosial.
- 3) **Promosi Pariwisata dan Budaya:** Pemerintah mempromosikan kota-kota santri sebagai destinasi wisata religi dan budaya yang menarik. Ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan lokal melalui pariwisata, tetapi juga

memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada wisatawan domestik dan internasional.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Muh Amin, seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama mengenai program pembangunan Kota Santri di Kota Parepare sebagai kawasan yang berorientasi pada pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

“Saya kira landasannya adalah program saat menjadi calon walikota, termasuk visi dan misinya yang tertuang dalam rencana strategis pengembangan kota. Hal tersebut tentu akan ditetapkan melalui keputusan pemerintah atau persetujuan anggota DPR. Semoga hal tersebut terwujud, namun saya tidak memiliki informasi lebih lanjut.”<sup>34</sup>

Landasan-landasan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kota-kota santri yang tidak hanya unggul dalam pendidikan agama Islam, tetapi juga dalam aspek ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya. Dengan demikian, program pembangunan kota santri diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

## **2. Program Pembangunan Yang Dirancang Pemerintah Sebelum Dan Sesudah Dalam Membangun Kota Parepare Sebagai Kota Santri**

### **a. Pencapaian Penyelenggara Pemerintah dalam Membangun Kota Santri**

Pencapaian penyelenggara pemerintah dalam membangun kota santri bisa dinilai dari berbagai aspek yang mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, serta promosi dan integrasi sosial. Berikut adalah beberapa pencapaian yang dapat menjadi indikator keberhasilan dalam upaya membangun kota santri:

---

<sup>34</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kementerian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

- 1) **Pembangunan Infrastruktur:** Pemerintah berhasil meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan raya, transportasi umum, air bersih, sanitasi, dan listrik di kota-kota santri. Ini memberikan dukungan yang penting bagi kehidupan sehari-hari santri dan masyarakat sekitar.
- 2) **Peningkatan Pendidikan:** Terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas dan jumlah lembaga pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren dan sekolah agama. Dukungan untuk pelatihan tenaga pendidik dan peningkatan fasilitas pendidikan juga dapat menjadi indikator keberhasilan.
- 3) **Pemberdayaan Ekonomi:** Pemerintah berhasil mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi yang efektif, termasuk bantuan untuk usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat santri dan sekitarnya.
- 4) **Pengembangan Potensi Lokal:** Ada upaya yang nyata dalam mengembangkan potensi lokal dan kearifan lokal dalam konteks kehidupan santri dan nilai-nilai Islam. Pemanfaatan sumber daya alam dan promosi produk lokal juga dapat menjadi bagian dari strategi ini.
- 5) **Promosi Pariwisata dan Budaya:** Pemerintah berhasil mempromosikan kota-kota santri sebagai tujuan wisata religi dan budaya yang menarik. Ini dapat dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan serta adanya program-program budaya yang mendukung identitas kota santri.
- 6) **Integrasi Sosial:** Terjadi peningkatan integrasi sosial antara masyarakat santri dengan masyarakat umum di sekitarnya. Hal ini tercermin dalam program-

program sosial dan keagamaan yang memperkuat solidaritas dan toleransi antar kelompok.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak H. Muh Amin, seorang pegawai di Kementerian Agama Kota Parepare, menunjukkan bahwa pencapaian penyelenggara pemerintah dalam membangun Kota Santri merupakan indikator keberhasilan dalam upaya membangun Kota Santri sebagai berikut :

“Sebenarnya, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah niat yang baik dan telah terlaksana sesuai dengan program yang telah diprogramkan. Namun, capaian sasarannya masih perlu ditingkatkan karena program tersebut tidak sejalan dengan hasil yang diharapkan. Masih banyak masyarakat di Kota Parepare yang belum mencerminkan citra sebagai kota santri, terlihat dari masalah narkoba dan judi online yang masih marak. Selain itu, tindakan-tindakan di tempat umum menunjukkan adanya pergaulan bebas antar remaja di Parepare ini, hal itu masih memprihatinkan menurut saya.”<sup>35</sup>

Keberhasilan pencapaian ini tidak hanya diukur dari aspek fisik dan ekonomi semata, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat santri secara keseluruhan. Pemerintah yang berhasil dalam membangun kota santri adalah yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan agama Islam yang berkualitas, ekonomi yang berkelanjutan, dan kehidupan sosial yang harmonis.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sabriah, salah satu pegawai di Kantor Statistik Kota Parepare, mengenai keberhasilan pemerintah dalam membangun Kota Santri yang berkualitas adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

“Menurut saya, Walikota ini lebih baik daripada pendahulunya karena keberhasilannya dalam pembangunan lebih terlihat.”<sup>36</sup>

Pencapaian ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga berbagai program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi penduduk kota santri. Meskipun begitu, tantangan seperti koordinasi antarinstansi, pendanaan yang memadai, dan pemantauan serta evaluasi yang efektif tetap menjadi fokus untuk memastikan keberhasilan program pembangunan kota santri ini secara berkelanjutan di Kota Parepare ini

#### b. Program yang Dirancang Pemerintah Sebelum dan Sesudah

Program pembangunan kota santri yang dirancang oleh pemerintah biasanya melibatkan serangkaian kebijakan dan inisiatif sebelum dan sesudah pembangunan dilakukan.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sabriah, salah satu pegawai di Kantor Statistik Kota Parepare, mengenai program Kota Santri sebelum dan sesudah dilakukannya pembangunan adalah sebagai berikut :

"Ya, itu saja yang saya katakan tadi. Pembangunannya cukup bagus dibandingkan sebelumnya. Sekarang, terkait penerangan, sebelumnya di lorong-lorong gelap, tetapi sekarang sudah ada penerangan yang membuatnya terang. Begitu juga dengan pantai-pantai yang dulu gelap dan tidak menyenangkan, sekarang sudah terang dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Sabriah,S.E, *Salah Satu Pegawai Kementerian Agama Kota Parepare*, Kantor Statistik Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Statistik Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>37</sup>Sabriah,S.E, *Salah Satu Pegawai Kementerian Agama Kota Parepare*, Kantor Statistik Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Statistik Kota Parepare, 16 Juli 2024.

Berikut adalah gambaran umum mengenai program-program yang biasanya dilakukan dalam tahap sebelum dan sesudah pembangunan kota santri:

#### 1) Sebelum Pembangunan

Pemerintah melakukan studi mendalam mengenai potensi dan kebutuhan kota santri yang akan dibangun. Ini termasuk analisis terhadap infrastruktur yang ada, kebutuhan pendidikan agama Islam, serta ketersediaan sumber daya manusia dan alam.

Konsultasi dengan berbagai pihak terkait seperti lembaga pendidikan Islam, tokoh agama, komunitas santri, serta masyarakat lokal untuk memahami aspirasi dan kebutuhan mereka.

Merumuskan kebijakan pembangunan kota santri yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk alokasi anggaran dan sumber daya untuk mendukung program-program ini.

Pemerintah melakukan penggalangan dana baik dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan pendidikan di kota santri.

#### 2) Sesudah Pembangunan

Fokus utama adalah membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan raya, transportasi, air bersih, sanitasi, dan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat santri dan sekitarnya.

Membangun dan memperluas lembaga-lembaga pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren, sekolah agama, dan universitas Islam dengan fasilitas yang memadai dan tenaga pendidik yang berkualitas.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Muh Amin, salah satu pegawai di Kementerian Agama Kota Parepare, mengenai kepedulian pemerintah dalam pembangunan pondok pesantren di Kota Parepare sebagai Kota Santri untuk mendukung pendidikan di Kota Parepare dan sekitarnya, adalah sebagai berikut :

“Kepedulian terhadap pondok pesantren saat ini memang sudah lebih maju dibandingkan sebelumnya, meskipun masih belum mencukupi dan perlu ditingkatkan. Terutama dalam hal pemberian beasiswa kepada siswa pesantren, yang saat ini hanya berlangsung selama satu minggu. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mendukung dengan memberikan beasiswa kepada pondok pesantren tersebut. Jangan hanya melihat mereka sebagai siswa madrasah, tetapi lihatlah pondok pesantren sebagai lembaga yang juga membutuhkan bantuan. Walaupun stafnya berada di bawah Kementerian Agama, pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan bantuan langsung kepada lembaga pondok pesantren. Sebagai contoh, di ITH, pemerintah dapat memberikan bantuan beasiswa kepada santri yang berprestasi melalui APBD, untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat S1 atau setidaknya sampai semester empat, serta mendukung penyelesaian skripsi mereka. Memberikan penghargaan kepada santri yang berprestasi dari pondok pesantren, seperti dalam olimpiade MTQ atau program lainnya, juga sangat penting.”<sup>38</sup>

Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan kota santri tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur fisik, tetapi juga mendukung pengembangan pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan bagi masyarakat santri dan sekitarnya.

---

<sup>38</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

### 3. Strategi Pembangunan yang Dilakukan Pemerintah dalam Membangun Kota Parepare Sebagai Kota Santri

a. Langkah-langkah pemerintah yang dilakukan untuk membangun Kota Parepare sebagai kota santri

Untuk membangun kota santri, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis berikut:

- 1) Pendidikan Agama yang Berkualitas
- 2) Dukungan untuk Pengembangan Ekonomi Lokal
- 3) Infrastruktur dan Fasilitas Publik
- 4) Pembinaan Karakter dan Nilai-nilai Keislaman
- 5) Pengembangan Wisata Religius
- 6) Promosi Toleransi dan Keberagaman
- 7) Penggunaan Teknologi dan Inovasi
- 8) Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak H. Muh Amin sebagai salah satu pegawai di Kementerian Agama Kota Parepare sebagai berikut :

“ Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Menganggarkan beberapa kegiatan melalui APBD-nya yang berpihak kepada penduduk pesantren.
2. Melakukan/melahirkan PERDA (Peraturan Daerah) atau perwalinya tentang bagaimana kepedulian pemerintah terhadap pondok pesantren

Kemudian dalam melakukan rujukan itu langkah-langkah program dalam mewujudkan kota santri adalah:

1. Melakukan kegiatan yang nomornya peduli pesantren, hal mana seluruh siswa yang mau tamat apakah SMA/SMP mau tamat disekolahnya itu diprogramkan untuk mengikuti pendidikan ala pondok pesantren selama 1 minggu, jadi mereka dimasukkan dipesantren selama 1 minggu supaya mereka merasakan bagaimana yang namanya kehidupan pondok pesantren. Ada beberapa pondok pesantren yang dijadikan sebagai tempat untuk memproses program tersebut yang seluruh pesantren yang ada di kota parepare yang memang betul-betul melakukan proses pendidikan betul-betul sebagai pondok pesantren.
2. Kemudian tentu memberikan bantuan-bantuan kepondok pesantren.
3. Kerja sama dengan lembaga-lembaga pondok pesantren dalam hal bagaimana mewujudkan parepare ini benar-benar diwarnai oleh jiwa santri dalam kehidupan. Kemudian warga masyarakatnya memberikan dukunga pemerintah terhadap pelaksanaan hari santri. Kemudian memberikan bantuan-bantuan dana hibah kepada lembaga-lembaga pondok pesantren yang ada.”<sup>39</sup>

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara komprehensif dan terkoordinasi, pemerintah dapat secara efektif membangun kota santri yang berkembang dinamis, berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan keberagaman, serta memberdayakan potensi ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

b. Strategi/Gagasan dari pemerintah untuk mengajak masyarakat dalam membangun kota Parepare sebagai kota santri.

Untuk mengajak masyarakat dalam membangun kota santri, pemerintah dapat mengimplementasikan berbagai strategi dan gagasan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

- 1) **Kampanye Pendidikan dan Kesadaran:** Melakukan kampanye publik yang menyampaikan pentingnya membangun kota santri sebagai pusat pendidikan agama, kebudayaan, dan ekonomi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, sosial media, dan acara-acara komunitas.
- 2) **Forum Diskusi dan Konsultasi Publik:** Mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan visi dan misi kota santri. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H. Muh Amin, salah satu pegawai di Kementerian Agama Kota Parepare, mengenai langkah-langkah pemerintah dalam membangun Kota Parepare adalah sebagai berikut:

“Setiap kali Walikota memberikan sambutan atau menghadiri kegiatan masyarakat, beliau selalu melakukan sosialisasi tentang program peduli pondok pesantren dan memberikan bantuan kepada pondok pesantren. Beliau juga menghimbau agar masyarakat benar-benar membudayakan kehidupan di pondok pesantren di Kota Parepare, dengan cara menyediakan ayat Alqur’an atau hadis serta ungkapan-ungkapan ulama sebagai peringatan di tempat-tempat strategis seperti jalan protokol dan lokasi lain di kota ini. Misalnya, di dekat kuburan terdapat hadis "janganlah mencelah orang yang mati", di daerah perkantoran terdapat ungkapan "yassir walatu’assir", dan di tempat-tempat rawan kecelakaan biasanya terdapat kutipan "jangan berjalan di atas bumi dengan cara yang sombong dan ikuti peraturan lalu lintas". Di Taman Syariah, tersedia literatur perpustakaan syar’i dengan harapan masyarakat membaca dan mengembangkan pengetahuan ala santri, serta mengadopsi pola hidup dengan jiwa santri.”<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

Dengan strategi-strategi ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kota santri sebagai pusat keagamaan dan pendidikan yang berkembang secara berkelanjutan.

Sama halnya dengan pembangunan pesantren itu sendiri. Pesantren di Kota Parepare dibangun dan dikelola oleh pimpinan pesantren atau lembaga pengelola pesantren, bukan oleh pemerintah secara langsung. Pesantren umumnya didirikan oleh tokoh agama atau komunitas keagamaan yang memiliki visi untuk menyediakan pendidikan agama Islam yang mendalam kepada santri.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Drs. H. Abd. Rahman Fasih, selaku pimpinan Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare, mengenai penyediaan sumbangan dana dari pemerintah Kota Parepare, adalah sebagai berikut:

“Pondok Pesantren DDI memiliki berbagai macam donatur, termasuk sumbangan dari pemerintah dan masyarakat. Mayoritas sumbangan berasal dari masyarakat, sementara banyak bantuan juga diberikan oleh warga DDI sendiri, termasuk alumni yang tersebar di berbagai tempat.”<sup>41</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Habibie Nursalam sebagai salah satu pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Drs. H. Abd. Rahman Fasih, *Selaku Pimpinan Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare*, Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare, 16 Juli 2024.

“Alhamdulillah, pembangunan pesantren ini didukung oleh sumber dana dari masyarakat. Kami sebagai pengurus yayasan hanya berperan sebagai tenaga atau pegawai yayasan. Pimpinannya adalah Ustaz Abd Jabbar.”<sup>42</sup>

Serta, Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Abdullah Hamzah selaku pimpinan pondok pesantren Al Mustaqim Kota Parepare sebagai berikut :

“Mengenai pembangunan pondok pesantren ini, saya kira prosesnya mirip dengan pondok pesantren atau yayasan lainnya, di mana pasti terdapat campur tangan pemerintah, meskipun mungkin tidak terlalu besar, karena juga ada bantuan dari masyarakat”<sup>43</sup>

Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada pesantren, seperti bantuan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, bantuan operasional, atau program-program pembinaan pendidikan agama. Dukungan ini biasanya diberikan melalui kementerian terkait hal pemberian dana atau anggaran, seperti Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H. Abd. Rahman Fasih, selaku pimpinan Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare, mengenai dukungan pemerintah dalam pembangunan pondok pesantren adalah sebagai berikut :

“Ya, ada dukungan seperti ini untuk asrama ini. Biayanya sekitar 1 miliar, dengan bantuan dari PEMDA sekitar 300 juta dari gubernur dan hampir 200

---

<sup>42</sup>Habibie Nursalam, *Sebagai Salah Satu Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare*, Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>43</sup>Abdullah Hamzah S.Ag.,M.Pd.I, *Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare*, Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare, 16 Juli 2024.

juta dari walikota. Sisanya didapatkan dari masyarakat, khususnya warga DDI dan alumni. Jadi, kami bersyukur jika mendapat dukungan dari pemerintah.”<sup>44</sup>

Selanjutnya, Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Habibie Nursalam sebagai salah satu pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare sebagai berikut :

“Alhamdulillah, kami menerima bantuan baik dalam bentuk fisik maupun sosial, seperti bantuan makanan dan sejenisnya. Mengenai bantuan dari pemerintah, saya pernah menerimanya, meskipun saya lupa nominalnya. Namun, bantuan untuk pembangunan biasanya cukup besar sesuai dengan anggaran yang tersedia.”<sup>45</sup>

Serta, Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Abdullah Hamzah selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare sebagai berikut :

“Tentang bantuan dari pemerintah, ada berbagai macam, seperti bantuan fisik seperti sembako dan sebagainya, dan ada juga yang berupa tunai. Hal ini sama dengan pesantren lainnya, hanya sisanya berasal dari donatur atau masyarakat.”<sup>46</sup>

Jadi Pemerintah juga dapat berperan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pesantren sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama terkait standar pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Secara keseluruhan, pembangunan dan pengelolaan pesantren merupakan tanggung jawab dari pimpinan pesantren atau yayasan pendidikan agama yang mengelolanya, sementara pemerintah bertanggung jawab

---

<sup>44</sup> Drs. H. Abd. Rahman Fasih, *Selaku Pimpinan Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare*, Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>45</sup> Habibie Nursalam, *Sebagai Salah Satu Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare*, Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>46</sup> Abdullah Hamzah S.Ag.,M.Pd.I, *Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare*, Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare, 16 Juli 2024.

untuk memberikan dukungan dan pengawasan yang diperlukan agar pesantren dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi pendidikan dan masyarakat di sekitarnya.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Profil Pesantren Kota Parepare**

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa, ada 9 pesantren yang memiliki banyak peminat. Dan dari 9 pesantren yang ada di Kota Parepare, penulis diantaranya ialah Pondok Pesantren Al Munawwarah, PonPes Salafiyah Al-Jawahir, Pesantren Ddi Lil Banat, PP Hafidziyah, Pesantren Ummul Quro, PonPes Al-Badar, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, PP Hidayatullah, dan Pondok Al-Mustaqim.

#### **a. Pondok Pesantren Ujung Lare**

Keberadaan Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Ujung Lare di Parepare yang didirikan oleh seorang tokoh ulama terkenal di Sulawesi Selatan yakni AG. KH. Abdul Rahman Ambo Dalle pada tahun 1957 yang menggunakan dana sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sumbangan dari Menteri Agama RI, sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang cukup lama keberadaannya di Kota Parepare, mempunyai peranan sangat besar dalam peningkatan sumber daya manusia yang handal dalam setiap bidang diperlukan tenaga yang handal dalam mengelola proses pendidikan. Keberadaan Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, pada hakekatnya merupakan perwujudan dari obsesi masyarakat Islam yang ada di Ajattappareng yang meliputi daerah pemerintah Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap, Enrekang, dan Kota Parepare pada khususnya serta Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, berdiri sendiri yang diharapkan mampu melakukan kajian keislaman dan mendharma baktikan dirinya untuk

kepentingan umat Islam di daerah ini, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya.

Hal ini dapat kita lihat dari masyarakat untuk memasukan anaknya pada Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare tiap tahun ajaran baru. Dalam perkembangan Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare dalam lima tahun terakhir sangat membanggakan dan patut kita syukuri, oleh karena dalam perjalanannya telah mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya. Namun demikian peningkatan yang dialami Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare dari berbagai segi, belum ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, bantuan dari berbagai pihak sangat diharapkan khususnya dari pemerintah dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yaitu pembangunan rumah susun sewa untuk santri di lingkungan Pondok Pesantren Ujung Lare Kota Parepare yang berlokasi di Jalan Abu Bakar Lambongo No. 53 Telp.(0421) 21174, Fax, (0421) 21174 Kota Parepare, mempunyai faktor pendukung yang sangat positif, mengingat santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare hampir 60 persen berasal dari luar Kota Parepare, santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare selama ini tinggal di asrama namun setiap tahun bertambah dan sudah tidak dapat menampung, mengingat asrama yang ada sekarang ini dibuat sejak tahun 1980an.

Pondok Pesantren Ujung Lare saat ini memiliki santri sebanyak 83 santri, diantaranya 39 santri laki-laki dan 44 santri wati. Dan itu resmi penulis dapat langsung dari hasil penelitian tersebut. Adapun bantuan yang diberikan langsung oleh PERDA untuk Pondok Pesantren Ujung Lare adalah sekitar 300-an Juta Rupiah.

b. Pondok Pesantren Hidayatullah

Kehadiran Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatullah di Parepare, Sulawesi Selatan, dirasakan cukup membantu masyarakat untuk lebih mengenal ajaran agama Islam. Kehadiran Ponpes yang berpusat di Kalimantan Timur ini memiliki sejarah yang cukup pancang. Pada awalnya Hidayatullah adalah sebuah pondok pesantren yang berdiri di atas lahan wakaf seluas 120 hektare di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang didirikan oleh Ust Abdullah Said pada 7 Januari 1973. Dalam perkembangannya, Ust Abdullah mengirimkan santri-santrinya untuk berdakwah ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah minoritas Muslim. Di tempat tugas yang baru, para santri Hidayatullah tak sekadar berdakwah, tetapi juga membangun cabang pondok pesantren Hidayatullah untuk lebih melancarkan perkembangan Islam.

Pada akhirnya, tersebarlah ke lebih dari 100 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dalam bentuk pondok pesantren termasuk di Kota Parepare ini. Di Parepare di awal perintisan diutus Ust Furqon. Pada tahun 1994 Ust Furqon bersama istri mulai berdakwah dilingkungan masyarakat, disamping itu fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan. Dia bersama istrinya mengajak masyarakat yang semula tidak mengenal islam atau sudah islam tapi keyakinan masih setengah-setengah untuk ber-Islam secara kaffah dengan berpengang teguh pada Alquran dan Hadist sebagai pedoman hidup. Perjuangan ust Furqon kurang lebih 16 tahun lamanya mampu menumbuh dan mengembangkan Pondok Pesantren Hidayatullah di Kota Parepare dengan santri awal sekitar 20 santri, hingga akhirnya terus bertambah.

Namun, perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh Ust Hamka Saifullah pada tahun 2010 melalui Musda Hidayatullah Parepare di Gedung Hidayatullah

Parepare pada Oktober 2010 lalu. Sampai akhirnya Ponpes Hidayatullah terus berkembang dan membangun sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga tingkat SMA. Kepala SMA Hidayatullah Ust Kadir yang ditemui mengurai bahwa kepemimpinan Ust Hamka Saifullah mampu mendirikan jenjang pendidikan formal mulai TK, SD, SMP dan SMA di Jalan Sakinah Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Adanya sekolah formal yang mulai menerima siswa sejak enam tahun lalu ini membuat keberadaan pondok pesantren Hidayatullah lebih dikenal lagi oleh masyarakat.

Pondok Pesantren Hidayatullah sekarang ini memiliki 150 santri, dan berbagai prestasi sudah diraih oleh santri. Dan adapun bantuan yang diberikan PERDA adalah senilai Rp345.000.000,-

c. Pondok Pesantren Al Mustaqim

Pesantren Al-Mustaqim di Kota Parepare terletak di Jalan Perumahan Polwil Dua, Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini, para santri tak dibebani biaya sedikit pun. Mulai dari pakaian, alat tulis menulis, hingga makan-minum.

Pondok Pesantren Al-Mustaqim didirikan Ustadz Abdullah Hamzah pada 10 oktober 2006 silam. Kini jumlah santri yang terdaftar ada 613 orang. Ongkos proses belajar di pesantren ini berasal dari satu sumber, yaitu Dana Abadi Umat (DAU). Dana ini berasal dari sumbangan dan sedekah kaum muslimin di seluruh tanah air. Pesantren yang selain menekankan pelajaran keislaman juga senantiasa memadukannya dengan nilai-nilai kesetiaan terhadap Pancasila serta NKRI ini menjadi binaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Korem 142 Taroda Tarogau dan Kodim 1405 Mallusetasi serta Lembaga Pemasarakatan Parepare ini masih eksis di kota Parepare. Pendiri sekaligus pimpinan Pondok Psantren Al-Mustaqim, Abdullah Hamzah mengaku

terinspirasi membangun pesantren pada awal Ramadhan 2006 lalu. Abdullah yang merupakan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini mengaku sekali-kali mengalami kesulitan dana. Pendiri pesantren ini pun kerap meminjam uang di bank dengan menggadaikan sertifikat PNS bersama istrinya yang juga bekerja sebagai pendidik PNS. Selain itu, ia senantiasa yakin Allah SWT kaya dan maha pemberi rezeki. Ia pun kerap mendapatkan bantuan dana yang tak disangka-sangka dari umat Islam, baik yang tinggal di Parepare maupun dari luar Parepare. Adapun dana bantuan yang diberikan PERDA adalah senilai kurang lebih 300 juta rupiah.

c. Pondok Pesantren Salafiyah Al-Jawahir

didirikan pada tahun 2003 oleh seorang ulama terkemuka, KH. Mamat Saeful Qodir. Motivasi beliau adalah melihat kebutuhan akan pusat pendidikan Islam yang holistik dan mampu mencetak generasi yang kuat dalam iman dan budi pekerti. Adapun jumlah santri saat ini mencakup 135 santri. Dan dana yang diberikan oleh PERDA kepada pondok pesantren adalah sekitar 300 juta.

d. PPS Wustha Al-Munawwarah

merupakan salah satu sekolah jenjang Pondok Pesantren berstatus Swasta yang berada di wilayah Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. PPS Wustha Al-Munawwarah didirikan pada tanggal 1 Januari 1970 dengan Nomor SK Pendirian yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Dengan adanya keberadaan PPS Wustha Al-Munawwarah, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare. Jumlah santri saat ini 68 santri. Dan dana bantuan yang diberikan PERDA adalah sekitar 290-an juta.

e. Mis Hafidziyah

merupakan salah satu sekolah jenjang MI berstatus Swasta yang berada di wilayah Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. MIS HAFIDZIYAH didirikan pada tanggal 29 Desember 2004 dengan Nomor SK Pendirian 52 TAHUN 2004 yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Operator yang bertanggung jawab adalah Aslinda. Dengan adanya keberadaan MIS HAFIDZIYAH, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Bacukiki, Kota Parepare. Dengan jumlah santri saat ini adalah 99 santri. Adapun dana bantuan yang diberikan adalah sekitar 300-an juta rupiah.

- g. Pesantren Ummul Quro terletak di Jl. Sejahtera. Pesantren ini memiliki total 75 santri yang diajar oleh 7 orang guru pendidikan agama Islam.
- h. PonPes Al-Badar terletak di Jln. Pesantren No. 10 Bilalang Kelurahan Lemoe. Pesantren ini memiliki total 274 santri dan dipimpin oleh 17 orang guru yang membimbing para santri untuk mengembangkan akhlak yang baik. Pondok Pesantren Al-Badar Pare-pare didirikan pada tanggal 10 Agustus 1996 M bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1417 H. Adapun dana sumbangan yang diberikan oleh PERDA adalah sekitar 360-an juta rupiah.
- i. Pondok Bahrul Ulum terletak di JLN. JEND. M.YUSUF. pondok ini memiliki total 86 santri, dan mereka dibimbing oleh 7 orang guru yang membekali mereka dengan pemahaman Islam yang komprehensif. Dan dana bantuan yang diberikan PERDA adalah sekitar 300-an juta rupiah.

## 2. Pengembangan Lingkungan Santri Yang Kondusif

Pengembangan lingkungan santri yang kondusif adalah hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan holistik santri. Berikut beberapa aspek yang dapat diperhatikan dalam pengembangan lingkungan santri yang kondusif:

- a. **Infrastruktur Fisik:** Memiliki fasilitas pendidikan yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, asrama yang bersih dan aman, masjid atau tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas olahraga dan rekreasi yang mendukung.
- b. **Keamanan dan Keselamatan:** Menyediakan lingkungan yang aman dan terlindungi untuk santri, termasuk pengawasan yang memadai di lingkungan asrama dan fasilitas umum.
- c. **Pendidikan Berkualitas:** Memastikan terdapat program pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan santri, baik dalam bidang agama maupun pendidikan umum.
- d. **Kesehatan dan Kesejahteraan:** Menyediakan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan dukungan kesejahteraan mental serta fisik bagi santri.
- e. **Pengembangan Karakter dan Etika:** Mendorong pembentukan karakter yang baik dan etika yang tinggi melalui pembinaan dan pendampingan dari para pengajar dan pembimbing.
- f. **Partisipasi Komunitas:** Mendorong partisipasi aktif dari santri dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan kegiatan lainnya yang memperkaya pengalaman mereka di pesantren.

- g. Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran, komunikasi, dan pengelolaan administrasi pesantren secara efektif.
- h. Kemitraan dengan Masyarakat: Membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat sekitar untuk mendukung dan memperkuat pengembangan pesantren sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas.
- i. Pembinaan Kepemimpinan: Mendorong pengembangan kepemimpinan di kalangan santri untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab.

Pengembangan lingkungan santri yang kondusif membutuhkan kolaborasi antara pimpinan pesantren, pengajar, orang tua santri, serta dukungan dari pemerintah dan komunitas lokal. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pesantren dapat menjadi lingkungan yang tidak hanya mendukung pendidikan agama, tetapi juga mempersiapkan santri untuk menghadapi tantangan dunia modern dengan sikap yang berlandaskan nilai-nilai Keagamaan Dan Moral.<sup>47</sup>

### **3. Peningkatan Akses Pemerintah Dalam Membangun Kota Santri**

Peningkatan akses pemerintah dalam membangun kota santri adalah sebuah langkah penting untuk memajukan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di kawasan-kawasan dengan populasi santri yang besar. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akses ini antara lain:

---

<sup>47</sup>Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri( Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 18-26.

- a. Alokasi Dana dan Anggaran: Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk sekolah-sekolah, asrama, masjid, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya di kota-kota santri. Dana ini juga bisa digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada.
- b. Program Subsidi dan Bantuan: Memberikan subsidi atau bantuan dalam bentuk teknis maupun keuangan kepada pesantren dan lembaga pendidikan agama untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka dalam mendidik santri.
- c. Program Pembinaan dan Pelatihan: Menyediakan program pembinaan dan pelatihan bagi para pengelola pesantren dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen pesantren.
- d. Kemitraan dengan Swasta dan Lembaga Internasional: Menggandeng swasta dan lembaga internasional untuk mendukung pengembangan kota santri melalui investasi dalam infrastruktur dan program pendidikan.
- e. Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses pendidikan dan informasi di kota-kota santri, seperti pemanfaatan internet, e-learning, dan aplikasi pendidikan.
- f. Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan pesantren untuk memastikan standar kualitas dan keamanan terpenuhi.
- g. Program Pemberdayaan Ekonomi: Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi di kota-kota santri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mendukung pengembangan kota secara keseluruhan.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan pesantren serta pendidikan agama Islam di Indonesia. Langkah ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan masyarakat santri secara keseluruhan.<sup>48</sup>

#### **4. Peningkatan Sinergi Dan Peran Aktisifasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Kota Santri**

Untuk mewujudkan kota santri yang maju dan berdaya, peningkatan sinergi dan peran partisipasi masyarakat sangatlah penting. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan partisipasi masyarakat dalam membangun kota santri:

- a. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengadakan kampanye pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pesantren dan peran santri dalam pembangunan masyarakat dan negara.
- b. Pengembangan Program Partisipatif: Mendorong pengembangan program-program partisipatif di mana masyarakat lokal, termasuk santri, orang tua santri, dan komunitas sekitar, aktif terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan kota santri.
- c. Forum Dialog dan Konsultasi Publik: Membuka forum dialog dan konsultasi publik secara rutin untuk memfasilitasi diskusi antara pemerintah, pimpinan

---

<sup>48</sup>Didiet Haryadi Priyahutmo, "Santri dan Basis Kultural", Pancasila Abadi. Maret 1995, h. 54.

pesantren, dan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan masalah yang perlu diatasi.

- d. Kemitraan dengan Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah: Mendorong kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan kota santri melalui investasi, bantuan teknis, dan program pendidikan.
- e. Pengembangan Keterampilan dan Keahlian: Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada masyarakat setempat, termasuk santri dan penduduk lokal, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dan mendukung pembangunan kota santri.
- f. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong inisiatif ekonomi lokal dan usaha kecil-menengah yang melibatkan masyarakat santri, seperti program kewirausahaan dan pengembangan produk lokal yang dapat memperkuat ekonomi dan identitas kota santri.
- g. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, akses informasi, dan membangun jejaring kolaborasi antar stakeholder.
- h. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap implementasi program pembangunan kota santri untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan baik.

Dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh

komunitas santri dan masyarakat setempat, dapat mempercepat dan memperkuat pembangunan kota santri yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>49</sup>

#### 4. Undang-Undang Yang Menyangkut Santri

Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan santri, meskipun secara langsung tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur tentang santri secara menyeluruh. Namun, ada beberapa peraturan yang relevan yang mempengaruhi kehidupan dan pendidikan santri, terutama dalam konteks pendidikan agama di pesantren. Berikut beberapa informasi terkait:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang ini merupakan landasan bagi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang santri, namun memberikan dasar bagi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah, termasuk di pesantren.
- b. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Pesantren: Keputusan Presiden ini mengatur tentang bantuan sosial yang diberikan kepada pesantren untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk bagi santri.
- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan di Pesantren: Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan pendidikan agama di pesantren, termasuk kurikulum, pengelolaan, dan sertifikasi tenaga pengajar.

---

<sup>49</sup>Andi M. Sadat. Brand Belief: Strategi Membangun Merek Berbasis Keyakinan (Jakarta: Salemba, 2009), h.18.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Meskipun bukan spesifik untuk santri, undang-undang ini penting karena daerah-daerah di Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur pendidikan, termasuk pendidikan di pesantren.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan: Meskipun tidak terbatas pada santri, peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan pendidikan agama di berbagai tingkatan pendidikan, termasuk di pesantren. Secara umum, kehidupan santri diatur oleh aturan-aturan di atas, terutama terkait pendidikan agama dan penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur atau melindungi santri secara khusus di Indonesia, kecuali dalam konteks pendidikan agama dan keagamaan yang diatur dalam kerangka undang-undang pendidikan nasional dan peraturan-peraturan terkait.

Dalam prakteknya, perlindungan dan kepentingan santri sering kali dilindungi oleh berbagai aturan terkait pendidikan, agama, dan hak asasi manusia yang berlaku secara umum. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada undang-undang yang secara khusus dan eksplisit mengatur tentang santri secara terpisah dari konteks pendidikan agama dan keagamaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data diperoleh dilapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. kebijakan pemerintah dalam penyeleggaraan pesantren di kota parepare itu dalam menyediakan kebijakan, anggaran, dan infrastruktur yang mendukung pembangunan kota santri. Ini mencakup pengalokasian dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lainnya yang mendukung keberlangsungan pesantren dan kesejahteraan santri. Dalam proses pembangunan sangatlah penting. Masyarakat, termasuk santri dan orang tua santri, harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi program-program pembangunan kota santri. Dapat mempercepat pembangunan kota santri dengan meningkatkan aksesibilitas informasi, efisiensi pengelolaan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, peran pemerintah dalam membangun kota santri tidak hanya sebagai penyedia dana dan fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam memastikan pembangunan kota santri berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup santri dan masyarakat setempat secara keseluruhan.
2. Pencapaian program pemerintah dalam membangun kota santri di Kota Parepare itu meskipun pencapaian positif, masih ada tantangan seperti koordinasi antarlembaga, pengelolaan dana yang efisien, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan merata dan dirasakan secara luas oleh

masyarakat. Dengan demikian, program pemerintah dalam membangun kota santri telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, akses pendidikan, ekonomi lokal, dan penguatan budaya di kota-kota santri. Evaluasi terus-menerus dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat akan menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan pencapaian yang telah dicapai.

3. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam membangun Kota Parepare sebagai Kota Santri itu bahwa, pemerintah telah mengalokasikan dana atau anggaran yang signifikan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan fasilitas umum lainnya yang ada di pondok pesantren Kota Parepare. Pendanaan ini mendukung pembangunan sekolah, asrama, masjid, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya yang penting bagi santri dan masyarakat setempat. Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pimpinan pesantren, masyarakat lokal, lembaga lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan dampak pembangunan kota santri. Kemitraan ini membantu dalam perencanaan yang lebih holistik dan implementasi program yang lebih efisien.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain :

1. Prioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan seperti sekolah, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya. Pastikan fasilitas tersebut tidak hanya memadai secara fisik, tetapi juga berkualitas dalam penyediaan pendidikan yang bermutu.

2. Libatkan aktif pimpinan pesantren, masyarakat lokal, dan santri dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan kota santri. Adakan forum konsultasi dan dialog yang rutin sehingga dapat mendengarkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat setempat mengenai pembangunan pesantren yang ada di Kota Parepare.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arum Prabandari, *"Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman"*, (Universitas Negeri Yogyakarta: 2015).
- Badruzzaman, S.Ag., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum* (2019).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Djam'an Salori dan Aan Komariah, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Drs.H. Bahaking Rama, M.S., *Metode Penyebaran Islam Pada Awal Berkembangnya di Sulawesi Selatan dan Relevansinya Dengan Dakwah Islam di Kota Madya Ujungpandang* (Ujungpandang : Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujungpandang, 1996).
- Emzir, *"Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data"*, (ed.1-Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung; Alfabeta, 1995 ).
- Kormalia Hena *"Strategi Pengembangan Santri Pondok Pesantren Raudlatul Jannah Kecamatan Natar Lampung Selatan tahun 2022"*, (Skripsi Sarjana:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).
- Muhammad Nurfadrian *"Peran Kepemimpinan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Minta Kewirausahaan Santri di Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare tahun 2021"*, (Skripsi Sarjana:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).
- Muhammad Nurul Huda dan Muhammad Turhan Yani, *"Pelanggaran Santri terhadap Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan"*, (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2015).
- Nursan *"Manajemen Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare Dalam Pembinaan Santri Tahun 2020"*, (Skripsi Sarjana:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).
- Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut AL-MAWARDI dan Aplikasinya di IndonesiaI*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare, Vol 16 N0 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*

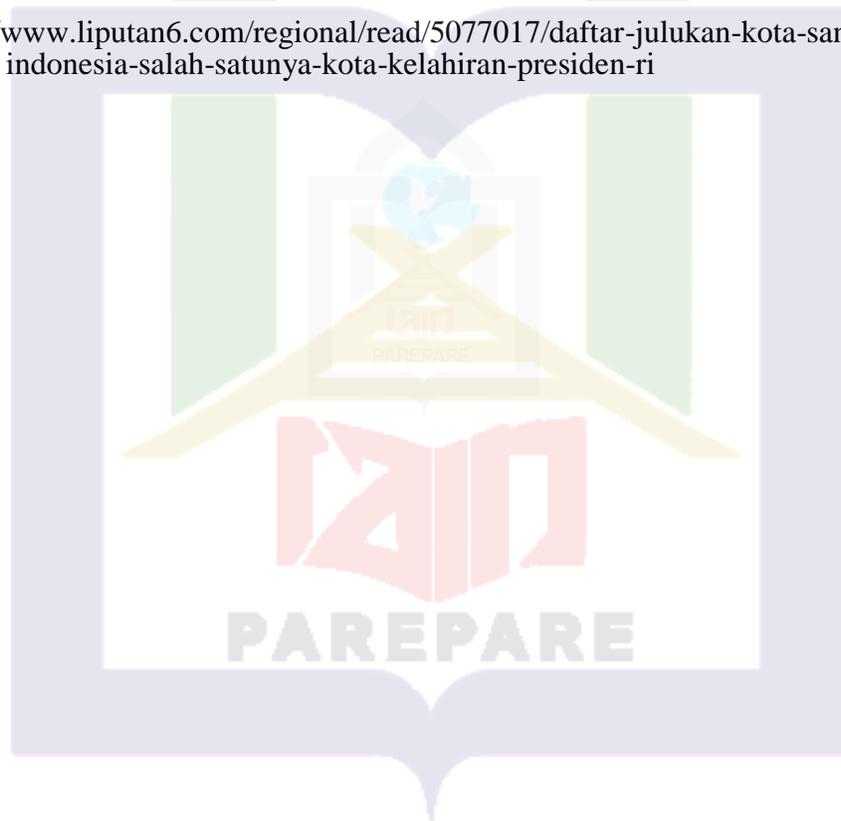
Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005).

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/21/120000879/sejarah-masuk-dan-berkembangnya-islam-di-indonesia>

<https://prenadamedia.com/product/pendidikan-islam-di-indonesia-historis-dan-eksistensinya> (diakses 18 november 2023)  
<https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/taufan-pawe-jadikan-kota-parepare-sebagai-kota-santri-dan-kota-ulama-ZltVN>

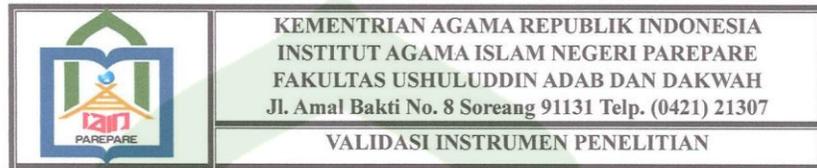
<https://www.liputan6.com/regional/read/5077017/daftar-julukan-kota-santri-di-indonesia-salah-satunya-kota-kelahiran-presiden-ri>



# LAMPIRAN



## Lampiran 1 : Validasi Instrumen Penelitian



NAMA MAHASISWA : Mita Permata Sari  
NIM : 17.2600.023  
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum  
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah  
JUDUL : Peran Pemerintah dalam Membangun kota Parepare  
sebagai kota Santri

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Pertanyaan untuk Pihak Kantor Kementerian Agama

1. Apa yang bapak ketahui tentang kebijakan pemerintah dalam membangun kota parepare menjadi kota santri?
2. Apa yang menjadi landasan pemerintah dalam mewujudkan program dalam membangun kota santri?
3. Apa langkah-langkah pemerintah yang dilakukan untuk membangun kota parepare sebagai kota santri?
4. Apa strategi/gagasan dari pemerintah untuk mengajak masyarakat dalam membangun kota parepare sebagai kota santri?
5. Bagaimana pencapaian penyelenggara pemerintah sampai sejauh ini dalam membangun kota santri?
6. Bagaimana menurut bapak mengenai program yang dirancang pemerintah sebelum dan sesudah dalam membangun kota santri ini?

#### Pertanyaan untuk pihak kantor Statistik

1. Bagaimana pencapaian penyelenggara pemerintah dalam membangun kota parepare menjadi kota santri?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program dana dalam membangun kota santri?

**Pertanyaan untuk pihak Pondok Pesantren**

1. Apakah pemerintah yang membangun pesantren? Atau pemeluk/pimpinan pondok pesantren?
2. Apakah pesantren menerima beberapa sumbangan dari pemerintah/walikota?

Parepare, 19 Desember 2023

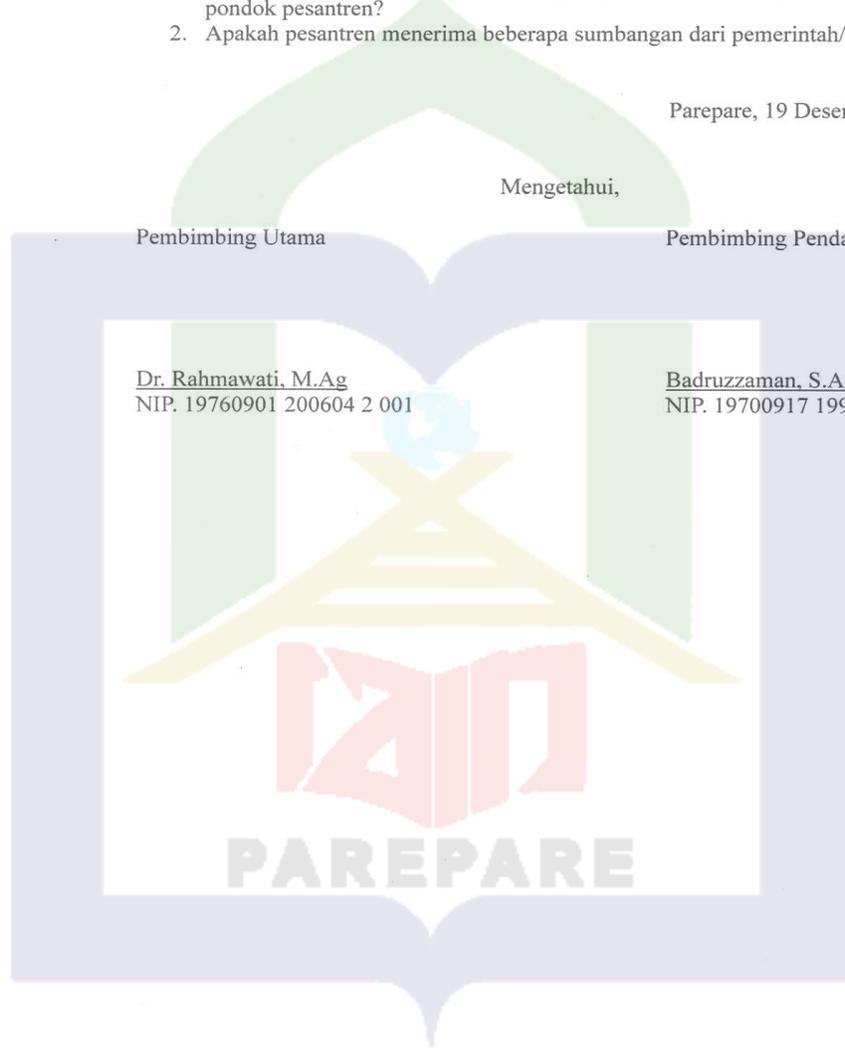
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

Badruzzaman, S.Ag., M.H.  
NIP. 19700917 199803 1 002



## Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1909/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2024

12 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MITA PERMATA SARI  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 Agustus 1999  
NIM : 17.2600.023  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN NO. 25 A, KEC. BACUKIKI BARAT, KOAT  
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA SANTRI"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000593

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 593/IP/DPM-PTSP/7/2024**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **MITA PERMATA SARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
ALAMAT : **JL JEND SUDIRMAN NO. 25 A PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA SANTRI**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Juli 2024 s.d 25 September 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **16 Juli 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, NM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Parepare  
Telepon 0421-21133 ; Faximile 0421-24996

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

Nomor : B- 382/Kk.21.16/2/PP.006/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **Mita Permata Sari**  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 04 Agustus 1999  
NIM : 17.2600.023  
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 25 A, Kec. Bacukiki Barat,  
Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dengan Judul Skripsi :

**“PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA SANTRI”**

Mulai tanggal 12 Juli 2024 s.d 22 Agustus 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2024





**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 66 Parepare 91122, Telepon (0421) 22766  
Homepage: <https://pareparekota.bps.go.id>, Email: [bps7372@bps.go.id](mailto:bps7372@bps.go.id)

**KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B-433/7372/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : Mita Permata Sari  
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 25 A Parepare  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melakukan penelitian/wawancara/mengambil data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Peran Pemerintah dalam Membangun Kota Parepare Sebagai Kota Santri"** pada satker BPS Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2024

a.n Kepala BPS Kota Parepare



NIP 19740111 199401 2 001



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (STAI – DDI)  
PAREPARE**

Alamat : Kampus DDI Jl. Abu Bakar Lambogo No. 53 Parepare 91131 Sulawesi Selatan  
Website: [www.staidi-parepare.ac.id](http://www.staidi-parepare.ac.id) / E-mail: [staidi.pares@gmail.com](mailto:staidi.pares@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 071/A.I/STAI-DDI/PR/VI/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keterangan Permohonan izin pelaksanaan penelitian 12 Juli 2024 dengan Nomor Surat B-1909/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2024 yang di tanda tangani oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, maka Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (STAI DDI) Parepare menerangkan bahwa:

**N a m a** : **MITA PERMATA SARI**  
**Tempat, tanggal lahir** : Parepare, 04 Agustus 1999  
**NIM** : 17.2600.023  
**Fakultas** : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah melaksanakan penelitian di STAI DDI Parepare dengan judul "PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA SANTRI"

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wabillahi taufiq wal da'wah wal irsyad*

Parepare, 11 Muharram 1446 H.  
16 Juli 2024 M.



Ketua,  
**Dr. Muh. Djunaidi, M.Ag.**



**YAYASAN SHIRATHAL MUSTAQIM**  
**PONDOK PESANTREN AL-MUSTAQIM PAREPARE**  
**TASSISO KEL. GALUNG MALOANG KEC. BACUKIKI KOTA**  
**PAREPARE**

*Akte Notaris : Nomor 49 Tanggal 22 Juni 2006*

*Alamat : Jl. Perum Polwil II Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Parepare Kode Pos 91125*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 100/YYS/PP.Am/Pr/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Pondok Pesantren AL-MUSTAQIM Parepare :

Nama : ABDULLAH HAMZAH, S.Ag.,M.Pd.I.  
NIP : 19691231 200501 1 060  
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren  
Alamat : Jl. Perum Polwil II Tassiso Kel. Galung Maloang  
Kel. Gaung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare

Menerangkan dengan sebenar-benarnya :

Nama : **MITA PERMATA SARI**  
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 04 Agustus 1999  
NIM : 17.2600.023  
PTN : IAIN Parepare  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)  
Judul : PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN KOTA PAREPARE  
SEBAGAI KOTA SANTRI

Telah melaksanakan Penelitian di Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare sejak tanggal 10 Juli s/d 17 Juli 2024 dengan judul tersebut di atas dengan nilai **"SANGAT BAIK"**.

Demikian Surat Keterangan ini di buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

*Wabillahi taufik wal hidayah, Ala Shiratal mustaqim  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Parepare, 16 Juli 2024  
Pimpinan Pondok Pesantren  
AL-MUSTAQIM Parepare.

  
**ABDULLAH HAMZAH, S.Ag.,M.Pd.I.**  
NIP. 19691231 200501 1 060

Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : *H. Muh. Amin, MA*

Tempat tanggal lahir : *Samarinda, 2-9-1968*

Jenis kelamin : *Laki-laki*

Agama : *Islam*

Pekerjaan/jabatan : *POS*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MITA PERMATA SARI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “(Peran Pemerintah Dalam Membangun Kota Parepare Sebagai Kota Santri (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare))”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare,.....

Yang bersangkutan



(*H. Muh. Amin*.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : USWATUN HASANAH

Tempat tanggal lahir : BANJARNEGARA, 22 DES 1994

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Pekerjaan/jabatan : STATISTISI AHLI PERTAMA BPS KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MITA PERMATA SARI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “(Peran Pemerintah Dalam Membangun Kota Parepare Sebagai Kota Santri (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare))”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare,.....

Yang bersangkutan



(USWATUN HASANAH.)

PAREPARE

## DATA MENTAH PENELITIAN

“yang saya ketahui sebagai aparat kementerian agama, yang ditempuh oleh pemerintah dalam membangun kota santri bahwa itu menjadi salah satu program pemerintah yang direncanakan dalam rencana program jangka pembangunannya untuk periode pemerintahan dari bapak Taufan Pawe selaku walikota mulai dari periode pertama sampai periode kedua, yang menjadi sasarannya sih saya lihat adalah bagaimana dia mewujudkan parepare ini benar-benar menjadi kota santri yang merupakan kunjungan dari peserta didik atau calon santri dari luar daerah di kota parepare, bahkan mengintegritaskan pendidikan pesantren didalam satuan lembaga pendidikan yang ada di kota parepare baik yang negeri maupun yang swasta, baik yang dikelola oleh kemediknas atau yang dikelola oleh kementerian agama.”<sup>50</sup>

“Kalau program dananya saya kurang tau dek, tapi kalau Infrastrukturnya sudah banyak dibangun seperti, rumah sakit, pembangunan tempat ibadah, kemudian pembangunan pengadaan Infrastruktur itu sepertinya bagus.”<sup>51</sup>

“kalau untuk menjadi landasannya, saya kira ya,, tentu programnya waktu menjadi calon walikota termasuk juga visi misinya yang tertuan didalam rencana strategis pengembangan kota ya,, tentu itu ditetapkan karena melalui keputusan pemerintah atau yang disepakati dengan anggota DPR itu yang artinya ya,, mestinya begitu dan mudah-mudahan itu ada, selebihnya saya tidak tau pasti dek.”<sup>52</sup>

“ya,, sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah niatnya bagus, dan itu sudah terlaksana sesuai dengan yang diprogramkan, itukan memang untuk capaian sasarannya memang masih perlu lebih ditingkatkan krn ternyata program itu tidak seirama dengan yang dihasilkan, melihat bahwa masih banyak masyarakat di Kota Parepare ini yang kelihatannya belum mencerminkan sebagai kota santri, narkoba masih banyak, judi online masih banyak, kemudian tindakan-tindakan seperti yang ada di tempat umum, kan di parepare

---

<sup>50</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

<sup>51</sup>Sabriah,S.E, *Salah Satu Pegawai Kementrian Agama Kota Parepare*, Kantor Statistik Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Statistik Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>52</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

ini kelihatannya masih pergaulan bebas antar remaja, saya kira itu masih memprihatinkan.”<sup>53</sup>

“Menurut saya lebih bagus dari walikota sebelumnya, karena wewenangnya beliau ini lebih kelihatan kalau masalah pembangunannya bagus.”<sup>54</sup>

“Ya,, itu saja dek yang saya bilang tadi, pembangunannya cukup bagus kalau dibandingkan sebelumnya. Sekarangkan pembangunan penerangan, kalau sebelumnya itukan kayak di lorong-lorong itu kalau sebelumnya gelap, sekarang sudah ada penerangan, itu sudah terang disitu kemudian pantai-pantai yang disana dulu gelap sehingga menjadi tempat yang tidak baguslah, sekarang sudah terang dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.”<sup>55</sup>

“kalau kepedulian terhadap pondok pesantren sih itu sudah ada dibandingkan yang lalu lebih maju walaupun sebenarnya masih blm cukup, masih sangat-sangat perlu ditingkatkan. Terutama ini tadi anak sekolah masuk pesantren itu kan cuman 1 minggu, yang paling bagus sebenarnya adalah bagaimana pemerintah mendukung untuk memberikan beasiswa kepada pondok pesantren itu, lihat pondok pesantrennya jangan lihat mereka sebagai murid madrasah, kalau dia lihat madrasah itu kadang-kadang pikirannya tidak bisa dibantu sesuai Instansi, mesti anggotanya itu kewenangannya kementerian agama, padahal sebenarnya pemerintah daerah bisa memberikan bantuan atas nama lembaga pondok pesantrennya. Yang mana memberikan bantuan kepada santri-santri yang dianggap berprestasi, itu kemudian dibiayai sampai kuliah. Misalnya, diperguruan tinggi yang ungu contoh misalnya di ITH, mestinya kan disitu ada program bagaimana berpihak kepada pondok pesantren kalau perlu lewat APBD, ya,, berikanlah beasiswa anak santri disitu misalnya sampai S1 atau paling tidak sampai semester 4-lah ataukan beri bantuan penyelesaian skripsinya. Artinya dari pondok pesantren, atau memberikan penghargaan kepada santri yang berprestasi itu juga penting, seperti olimpiade misalnya MTQ atau program-program lainnya.”<sup>56</sup>

“nah langkah-langkah yang dilakukan adalah:

---

<sup>53</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

<sup>54</sup>Sabriah,S.E, *Salah Satu Pegawai Kementrian Agama Kota Parepare*, Kantor Statistik Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Statistik Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>55</sup>Sabriah,S.E, *Salah Satu Pegawai Kementrian Agama Kota Parepare*, Kantor Statistik Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Statistik Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>56</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

1. mengganggu beberapa kegiatan melalui APBD-nya yang berpihak kepada penduduk pesantren.
2. melakukan/melahirkan PERDA (Peraturan Daerah) atau perwalinya tentang bagaimana kepedulian pemerintah terhadap pondok pesantren

Kemudian dalam melakukan rujukan itu langkah-langkah program dalam mewujudkan kota santri adalah:

1. Melakukan kegiatan yang nomornya peduli pesantren, hal mana seluruh siswa yang mau tamat apakah SMA/SMP mau tamat disekolahnya itu diprogramkan untuk mengikuti pendidikan ala pondok pesantren selama 1 minggu, jadi mereka dimasukkan dipesantren selama 1 minggu supaya mereka merasakan bagaimana yang namanya kehidupan pondok pesantren. Ada beberapa pondok pesantren yang dijadikan sebagai tempat untuk memproses program tersebut yang seluruh pesantren yang ada di kota parepare yang memang betul-betul melakukan proses pendidikan betul-betul sebagai pondok pesantren.
2. Kemudian tentu memberikan bantuan-bantuan kepondok pesantren
3. Kerja sama dengan lembaga-lembaga pondok pesantren dalam hal bagaimana mewujudkan parepare ini benar-benar diwarnai oleh jiwa santri dalam kehidupan. Kemudian warga masyarakatnya memberikan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan hari santri. Kemudian memberikan bantuan-bantuan dana hibah kepada lembaga-lembaga pondok pesantren yang ada.”<sup>57</sup>

“Untuk mengajak itu ya,, tentu disetiap kali ada sambutannya walikota atau menghadiri mungkin kegiatan masyarakat, sambutannya walikota selalu sosialisasi terhadap hal itu, menyampaikan tentang program peduli pondok pesantren dan memberikan bantuan kepondok pesantren, kemudian menghimbau kepada masyarakat agar supaya masyarakat benar-benar membudayakan hidup di pondok pesantren di kota parepare ini, antara lain dengan cara disetiap tempat-tempat strategis itu selalu ada ayat Alqur’an atau hadis ungkapan-ungkapan ulama yang dijadikan sebagai peringatan kepada masyarakat yang ada di kota parepare, disetiap jalan protokol, disetiap jalan strategis selalu ada itu, misalnya didekat kuburan disitu ada hadis yang “janganlah mencelah orang yang mati”, terus di daerah-daerah perkantoran ada disitu “yassir walatu’assir (permudahlah urusan jangan dipersuli)”, kemudian ditempat-tempat prioritas yang jalannya agak rawan kecelakaan biasa ditulis disitu “jangan berjalan di atas bumi dengan cara yang sombong dan ikuti

---

<sup>57</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

peraturan lalu lintas”, banyak itu untkapang-unkapannya disitu. Ada beberapa saya lihat disitu misalnya di taman syariah itu disiapkan literatur-literatur perpustakaan syar’i, harapannya adalah bagaimana masyarakat membaca itu lalu memiliki pengetahuan ala santri, seperti pola hidupnya memiliki jiwa santrian seperti itu caranya.”<sup>58</sup>

“Kalau DDI itukan ada donaturnya macam-macam ya, ada juga sumbangan-sumbangan dari pemerintah semua, kebanyakan dari masyarakat, kemudian DDI kan punya banyak warga, itulah yang memberikan banyak bantuan, bahkan alumninya ada dimana-mana.”<sup>59</sup>

“Yah,, alhamdulillah yang membangun pesantren ini adalah kalau sumber dananya dari masyarakat kemudian kami sebagai pengurus yayasan ini hanya sebagai tenaga atau pegawai yayasan, mengenai pimpinannya itu namanya Ust. Abd Jabbar.”<sup>60</sup>

“Kalau mengenai yang membangun pondok pesantren ini ya,, saya kira itu sama dengan pondok pesantren atau yayasan lainnya, dan itu pasti ada campur tangan pemerintah walaupun tidak seberapa, karena juga ada bantuan dari masyarakat”<sup>61</sup>

“iya,, ada, seperti ini asrama, biayanya ini asrama 1M, itu ada bantuan PEMDA tingkat 1-nya itu gubernur itu 300-an, kemudian dari pak walikota kemarin itu hampir 200 juta, selebihnya itu semua masyarakat, warga DDI khususnya lagi alumni disini. Jadi ya,, kalau dari pemerintah alhamdulillah kalau dapat.”<sup>62</sup>

“ya,, alhamdulillah kita menerima baik itu fisik, pernah juga dapat fisik atau bantuan-bantuan sosial berupa makanan dll. Kalau dari pemerintah dalam hal ini pernah, dan nominal dari sumbangan yang diberikan pemerintah saya lupa dek,

---

<sup>58</sup>H. Muh Amin, *Salah Satu Pegawai Kemnterian Agama Kota Parepare*, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, 15 Juli 2024.

<sup>59</sup>Drs. H. Abd. Rahman Fasih, *Selaku Pimpinan Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare*, Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>60</sup>Habibie Nursalam, *Sebagai Salah Satu Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare*, Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>61</sup>Abdullah Hamzah S.Ag.,M.Pd.I, *Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare*, Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>62</sup>Drs. H. Abd. Rahman Fasih, *Selaku Pimpinan Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare*, Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren MA/MTS DDI Ujung Lare Kota Parepare, 16 Juli 2024.

cuman yah kalau bantuan-bantuan bangunan itu biasa agak besar sesuai dengan anggaran, seperti itu dek.”<sup>63</sup>

“kalau mengenai bantuan dari pemerintah itu ada dek, dan bantuannya itu beda-beda, ada berupa fisik seperti bantuan sembako,dll. Dan ada juga berupa tunai, dan itu sama dengan pesantren lainnya, cuman selebihnya itu berasal dari donatur-donatur atau masyarakat.”<sup>64</sup>



---

<sup>63</sup> Habibie Nursalam, *Sebagai Salah Satu Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare*, Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare, 16 Juli 2024.

<sup>64</sup> Abdullah Hamzah S.Ag.,M.Pd.I, *Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare*, Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Pondok Pesantren Al Mustaqim Kota Parepare, 16 Juli 2024.

## DOKUMENTASI

### 1. Kantor Kementerian Agama



Gambar 1: suasana wawancara dengan H. Muh. Amin, MA salah satu pihak kantor di Kementerian Agama Kota Parepare.

## 2. Kantor Statistik



Gambar 2 : suasana wawancara dengan Sabriah S.E salah satu pihak kantor di Statistik Terpadu Kota Parepare

### 3. Pondok Pesantren DDI Lil Banat Ujung Lare



Gambar 3 : suasana wawancara dengan Drs. H. Abd. Rahman Fasih, M.Ag salah satu pihak Pondok Pesantren DDI Lil Banat Ujung Lare Kota Parepare

#### 4. Pondok Pesantren Al Mustaqim



Gambar 4 : suasana wawancara dengan Abdullah Hamzah S.Ag.,M.Pd.I salah satu pihak Pondok Pesantren Al Mustaqim.

## 5. Pondok Pesantren Hidayatullah



Gambar 5 : suasana wawancara dengan Ust. Habibie Nursalam salah satu pihak Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Parepare.

## BIOGRAFI PENULIS



Mita Permata Sari, lahir pada tanggal 04 Agustus 1999 di Kota Parepare, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama dari sepuluh bersaudara, pasangan dari Darliah dan Aiptu Sakri. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 46 Kota Parepare pada tahun 2004-2010, SMP Negeri 3 Kota Parepare Tahun 2011-2013, SMA Negeri 2 Parepare Tahun 2013-2016 Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Penulis menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2024. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis mengajukan skripsi dengan judul “Peran Pemerintah dalam Membangun Kota Parepare Menjadi Kota Santri”.